



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN
PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Hasna Nabila Syafriti

0221 18 249

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2022



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN
PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA,
CMA, CCSA, C.A, CESP, QIA., CFE.,
CGCAE)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN PAJAK
DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022

Hasna Nabila Syafriti

0221 18 249

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang



(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Monang Situmorang, Drs., M.M., Akt)

Anggota Komisi Pembimbing



(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP.,
CertDA., CAP)

LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Nabila Syafriti
NPM : 0211 18 249
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Cianjur, 9 Juli 2022



Hasna Nabila Syafriti

0221 18 249

HAK CIPTA

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

HASNA NABILA SYAFRITI 022118249. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Dibawah bimbingan: MONANG SITUMORANG dan HAQI FADILLAH. 2022.

Manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan bisa dikelola dengan baik, efisien serta ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan ataupun penghindaran pajak. Digunakannya tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak karena tarif pajak efektif memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas asset tetap dan intensitas persediaan merupakan faktor yang memengaruhi manajemen pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan dapat memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *verifikatif* metode *explanatory survey* dengan menggunakan data sekunder. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dari 53 populasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diperoleh sampel sebanyak 23 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel, dengan menggunakan *Software Statistic Eviews 10*. Pengujian yang dilakukan yaitu uji pemilihan model, analisis statistik deskriptif, analisis data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan tingkat utang dan intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas asset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Manajemen Pajak.

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat kehendaknya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ibu saya Sri Hartati dan Ayah saya Erwin Syaprudin dan Kakak laki-laki saya Muhammad Rafif Ramadhan yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungannya baik moral maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.pd. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, A.k., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
6. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, A.k., MBA., CMA., CCSA., CA., CESP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M., CA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Haqi Fadillah S.E., M.Ak., BKP., CertDA., CAP. selaku anggota komisi pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Staff pengajar, beserta karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
11. Sahabat-sahabat tersayang Elsa Nur Ananda dan Layla Nurul Hanifah yang selalu memberikan semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan kelas C Akuntansi 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
13. Teman-teman satu komisi yang selalu memberikan semangat dan dan selalu berbagi ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Angkatan 2018.

15. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangan, semoga kekurangan tersebut dapat menjadikan pembelajaran yang lebih luas bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua.

Cianjur, 05 Juli 2022

Penulis,

Hasna Nabila Syafriti

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Peneliti.....	10
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	10
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pajak.....	11
2.1.1 Definisi Pajak.....	11
2.1.2 Pajak Penghasilan.....	11
2.1.3 Fungsi Pajak.....	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.5 Subjek Pajak.....	12
2.1.6 Objek Pajak.....	13
2.2 Manajemen Pajak.....	15

2.2.1 Definisi Manajemen Pajak.....	15
2.1.2 Pengukuran Manajemen Pajak.....	17
2.2 Ukuran Perusahaan.....	19
2.2.1 Definisi Ukuran Perusahaan	19
2.2.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan	20
2.3 Tingkat Utang.....	21
2.3.1 Definisi Tingkat Utang	21
2.3.2 Pengukuran Tingkat Utang	24
2.4 Profitabilitas	26
2.4.1 Definisi Profitabilitas.....	26
2.4.2 Pengukuran Profitabilitas.....	27
2.5 Intensitas Aset Tetap	29
2.5.1 Definisi Intensitas Aset Tetap.....	29
2.5.2 Pengukuran Intensitas Aset Tetap.....	31
2.6 Intensitas Persediaan	31
2.6.1 Definisi Intensitas Persediaan.....	31
2.6.2 Pengukuran Intensitas Persediaan.....	32
2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	33
2.7.1 Penelitian Sebelumnya.....	33
2.7.2 Kerangka Pemikiran	38
2.7.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak.....	38
2.7.2.2 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak.....	38
2.7.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak	39
2.7.2.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak	39
2.7.2.5 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak	39
2.7.2.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak	40
2.8 Hipotesis Penelitian.....	41

BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber data Penelitian	42
3.4 Operasional Variabel	43
3.5 Metode Penarikan Sampel	44
3.6 Metode Pengumpulan Data	45
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	45
3.7.1 Statistik Deskriptif	46
3.7.2 Model Regresi Data Panel	46
3.7.3 Pemilihan Model Estimasi Data Panel	47
3.7.3.1 Model Pooled (Common Effect)	47
3.7.3.2 Model Efek Tetap (Fixed Effect)	48
3.7.3.3 Model Efek Acak (Random Effect)	48
3.7.4 Uji Kesesuaian Model	49
3.7.4.1 Uji Chow	49
3.7.4.2 Uji Hausman	49
3.7.4.3 Uji Langrange Multiplier	49
3.7.5 Uji Asumsi Klasik	50
3.7.5.1 Uji Normalitas Data	50
3.7.5.2 Uji Multikolienaritas	50
3.7.5.3 Uji Heteroskedastisitas	51
3.7.5.4 Uji Autokorelasi	51
3.7.6 Uji Hipotesis	52
3.7.6.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji Statistik t)	52
3.7.6.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F)	52
3.7.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53

4.1 Hasil Pengumpulan Data	53
4.2 Kondisi Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	55
4.2.1 Kondisi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	55
4.2.2 Kondisi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	56
4.2.3 Kondisi Tingkat Utang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	57
4.2.4 Kondisi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	58
4.2.5 Kondisi Intensitas Aset Tetap Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	58
4.2.6 Kondisi Intensitas Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	59
4.3 Statistik Deskriptif	60
4.4 Analisis Data	62
4.4.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel	62
4.5 Uji Asumsi Klasik	65
4.6 Analisis Regresi data Panel	69
4.7 Uji Hipotesis	71
4.8 Pembahasan	74
4.8.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	74
4.8.2 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	76

4.8.3	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	78
4.8.4	Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	79
4.8.5	Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	81
4.8.6	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		85
5.1	Simpulan.....	85
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		91
LAMPIRAN.....		92

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Operasional Variabel Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	43
Tabel 3.2 Proses Seleksi Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	45
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	54
Tabel 4.2 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Langrange Multiplier	65
Tabel 4.7 Hasil Kesimpulan Pengujian Pemilihan Model	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Data Panel	69
Tabel 4.12 Hasil Uji t	71
Tabel 4.13 Hasil Uji F	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi	74
Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	84

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	40
Gambar 4.1 Gambar Dan Tabel Data Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	55
Gambar 4.2 Gambar Dan Tabel Data Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020	56
Gambar 4.3 Gambar Dan Tabel Data Tingkat Utang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	57
Gambar 4.4 Gambar Dan Tabel Data Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	58
Gambar 4.5 Gambar Dan Tabel Data Intensitas Aset Tetap Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020	59
Gambar 4.6 Grafik Dan Tabel Data Intensitas Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020	60
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	66
Gambar 4.8 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Ukuran Perusahaan dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	75
Gambar 4.9 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Tingkat Utang dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	76
Gambar 4.10 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Profitabilitas dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	78
Gambar 4.11 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Intensitas Aset Tetap dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang	

Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020
..... 80

Gambar 4.12 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Intensitas Persediaan dan
Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang
Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020
..... 81

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Perhitungan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	93
Lampiran 2 Perhitungan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	96
Lampiran 3 Perhitungan Tingkat Utang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	99
Lampiran 4 Perhitungan Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	102
Lampiran 5 Perhitungan Intensitas Aset Tetap pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	105
Lampiran 6 Perhitungan Intensitas Persediaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Salah satu fungsi perpajakan adalah membiayai berbagai pengeluaran publik. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari iuran wajib rakyat, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum ataupun pengeluaran rutin serta “*surplus*”-nya untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2019). Usaha pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan penerimaan pajak diawali dengan melaksanakan usaha intensifikasi serta ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-147/PJ.7/2003).

Selaku salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Ketika status perpajak perusahaan berubah menjadi wajib pajak, hal itu terjadi karena perusahaan menerima penghasilan serta akan membayar pajak penghasilan. Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai keuntungan yang diharapkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan adalah meminimalkan beban pajak pada batas tidak melanggar aturan, karena pajak adalah salah satu aspek yang dapat mengurangi laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin besarnya penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan akan memerlukan perencanaan pajak ataupun *tax planning* yang tepat supaya perusahaan membayar pajak dengan efisien (Rahatiati, 2015).

Tax planning ialah suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) dan perannya adalah menganalisis secara sistematis berbagai opsi untuk mencapai kewajiban pajak minimum. *Tax management* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada *tax planning*. Sebagai *tax management* tidak terlepas dari konsep manajemen secara *universal* yang merupakan upaya - upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) (Pohan, 2013).

Menurut Pohan (2013), manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan ataupun organisasi supaya hal-hal

yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan ataupun organisasi tersebut bisa dikelola dengan baik, efisien serta ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Ini tidak akan mengarah pada pelanggaran pajak atau penghindaran pajak. Manajemen pajak dalam konteks perpajakan Indonesia merupakan hal yang biasa atau legal dilakukan oleh suatu perusahaan karena kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perihal mendasar dari manajemen pajak perusahaan tidak hanya untuk meminimalkan beban pajak, tetapi juga untuk menghindari kesalahan perusahaan dalam membayar pajak.

Dalam rangka mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk intensif penurunan tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri, berupa Perseroan Terbuka yang diatur bersumber pada UU Nomor 36 pasal 17 ayat 1b, menjelaskan bahwa tarif pajak wajib pajak badan yang diterapkan pada tahun 2010 sebesar 28% kemudian turun menjadi 25% yang diberlakukan pada tahun 2010 dalam UU perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2a. Terdapat fenomena yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penindakan covid-19 yang semula tarif pajak dalam wujud usaha sebesar 25% menjadi 22% di tahun 2020 (Nurdiana, 2020).

Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki pasar modal yang menjadi sumber dunia usaha. Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk perusahaan terbuka, apabila rasio kepemilikan saham publik tidak kurang dari 40% dari jumlah seluruh saham di Bursa Efek di Indonesia (BEI) yang diserahkan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memperoleh 3% lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku. Syarat ini dipaparkan pemerintah dalam PP Nomor 29/2020 tentang fasilitas PPh dalam penindakan covid-19. Aturan ini memberikan fasilitas yang berkaitan dengan *buyback* saham (Nurdiana, 2020).

Penulis menentukan objek penelitian Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdiri dari Sub Sektor Makanan dan Minuman, Sub Sektor Rokok, Sub Sektor Farmasi, Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga, serta Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga sebab perusahaan manufaktur ini mempunyai pendanaan dari pasar modal yang baik dengan menerbitkan efek (saham dan obligasi) serta menjualnya ke publik. Tidak hanya itu, Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang mendaftarkan di BEI lebih mendominasi daripada jenis perusahaan lainnya yang juga terdaftar di BEI. Dengan diketahuinya tren tarif pajak efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang *listing* di BEI sepanjang kurun 5 tahun terakhir ini (2016-2020), diharapkan dapat menjadi referensi untuk pemerintah dalam merencanakan penurunan tarif pajak penghasilan badan.

Terdapat fenomena tentang Manajemen Pajak, PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk melakukan *markup* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. PT Kimia Farma Tbk mengatakan sukses mendapatkan laba sebesar Rp 132 miliar. Tetapi, laba yang dilaporkan pada realitasnya berbeda. PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 sesungguhnya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 99 miliar. Kasus praktik manajemen pajak juga sempat terjadi pada PT Indofarma Tbk dalam bentuk praktik perataan laba. Pada tahun 2004, Bapepam menemukan bahwa terdapat nilai barang pada proses PT Indofarma Tbk lebih tinggi menurut nilai yang seharusnya (*overstated*). Akibat *overstated* tersebut, maka harga pokok penjualan akan *understated* sebanyak 28,8 miliar dan keuntungan bersih juga akan mengalami *overstated* dengan nilai yang sama pula. (Sunami, 2013)

Selain kasus diatas, kasus lain terkait manajemen pajak sempat terjadi pada PT Ades Alfindo Tbk. Manajemen baru PT Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Pada Juni 2004 terjadi penggantian manajemen di PT Ades dengan masuknya *Water Partners Bottling Co.* (perusahaan patungan *The Coca Cola Company* serta *Nestle SA*) dengan kepemilikan saham sebesar 65,07%. Pemilik baru yang sukses menemukan adanya inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan periode 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama. Perusahaan resmi mengubah nama perusahaan pada tahun 2004 menjadi PT Ades Waters Indonesia Tbk ketika *Water Partners Bottling* mengambil alih mayoritas saham diperseroan. Pada tahun 2010, Ades Waters Indonesia Tbk mengubah namanya lagi sebagai PT Akasha Wira International Tbk pada waktu memperluas bidang usahanya dalam usaha kosmetika dengan dibelinya aset berupa mesin-mesin produksi kosmetika milik PT Damai Sejahtera Mulia, perusahaan produk kosmetika perawatan rambut. (Sunami, 2013)

Manajemen Pajak menurut Suandy (2011) ialah fasilitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang dibayar bisa ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba serta likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak dapat diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yaitu penghitungan yang digunakan sebagai acuan pengukuran, karena dianggap bisa merefleksikan perbedaan antara laba buku dengan laba fiskal. Tarif pajak efektif bisa dihitung melalui pembayaran pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Pembayaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembayaran pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan arus kas, sedangkan laba sebelum pajak terdapat pada laporan laba rugi.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar ataupun kecilnya perusahaan (Isnaeni, 2020). Memanfaatkan besar kecilnya ukuran perusahaan bisa menjadi salah satu cara untuk

mendapatkan insentif pajak. Hubungan ukuran perusahaan dengan Manajemen Pajak yakni perusahaan yang kecil cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan Manajemen Pajak sebab kurangnya tenaga *professional* dalam bidang tersebut sehingga perusahaan kehilangan peluang untuk memperoleh insentif pajak (Darmadi, 2013). Penelitian ini menggunakan Ln (total aset) untuk menentukan nilai ukuran perusahaan.

Menurut Hery (2016) tingkat utang yakni kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai dengan utang serta kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Pengaruh tingkat utang dengan Manajemen Pajak ialah perusahaan yang menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang wajib dibayar. Dengan terdapatnya utang perusahaan akan lebih memilih memakai utang dalam pembiayaan. Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan total utang dengan total ekuitas. Total ekuitas dan total utang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional,

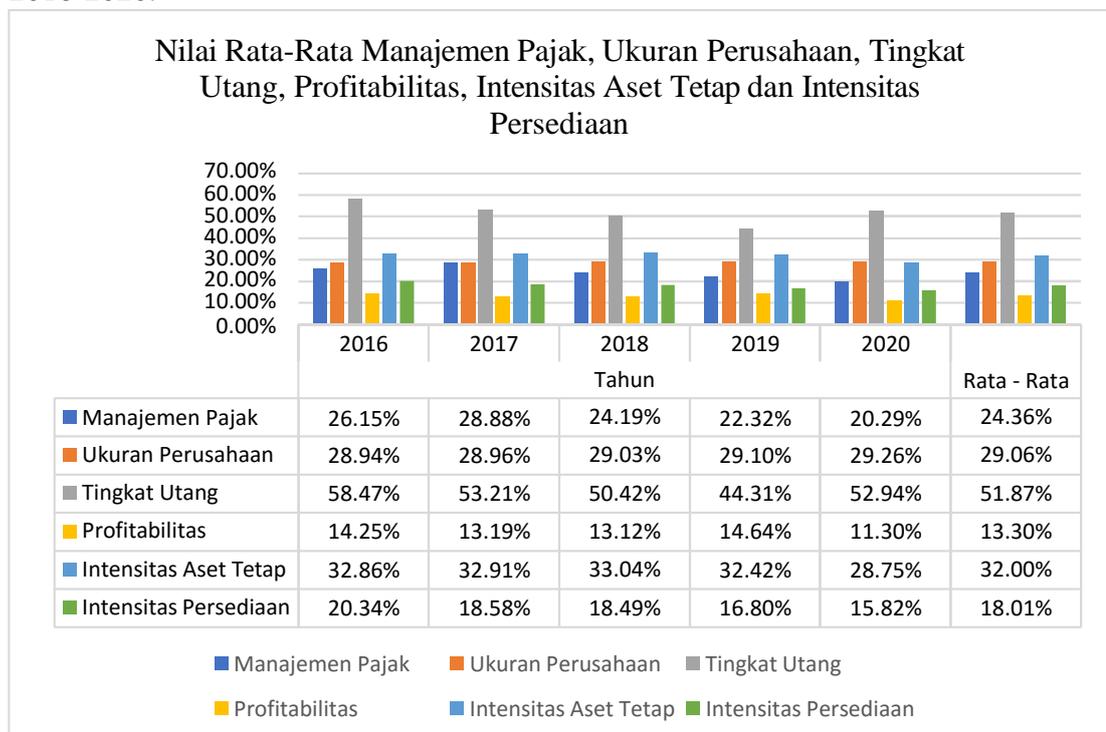
Profitabilitas yakni ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan menyamakan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai (Selvia, 2020). Pengaruh Profitabilitas dengan Manajemen Pajak ialah besarnya Profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya yakni karena perusahaan dengan tingkatan efisiensi yang tinggi dan yang mempunyai pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) untuk menentukan nilai profitabilitas. *Return on asset* (ROA) adalah indikator yang mengukur seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba atau profit. ROA dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan aset perusahaan secara keseluruhan (total aset).

Intensitas aset tetap yakni cerminan besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap menurut IAI, PSAK (2007: 16.2) adalah: Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengaruh Intensitas Aset Tetap dengan Manajemen Pajak ialah karena terdapatnya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Penelitian ini menggunakan total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan untuk menentukan nilai intensitas aset tetap.

Intensitas persediaan merupakan bagian dari *Capital Intensity Ratio*, kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam wujud persediaan (Ardiansyah, 2014). Pengaruh intensitas persediaan dengan Manajemen

Pajak ialah perusahaan yang mempunyai jumlah persediaan yang besar memerlukan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Penelitian ini menggunakan total persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan untuk menentukan nilai intensitas persediaan.

Berikut disajikan hasil nilai rata-rata dari Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020.



(Sumber: www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com data diolah oleh penulis, 2021)

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

Berdasarkan hasil pada gambar grafik 1.1 diatas mengenai grafik rata-rata manajemen pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020. Berdasarkan UU Nomor 36 pasal 17 ayat 1b, menjelaskan bahwa besarnya tarif pajak bagi wajib pajak badan dengan bentuk usaha sebesar 28% lalu diturunkan menjadi 25% yang diberlakukan pada tahun 2010 dalam UU perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2a. Terdapat fenomena yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 pemerintah

memberikan fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penindakan covid-19 yang semula tarif pajak dalam wujud usaha sebesar 25% menjadi 22% di tahun 2020 (Nurdiana, 2020). Tarif pajak efektif (manajemen pajak) dari 23 perusahaan yang dijadikan sampel, memiliki nilai > 25% dan > 22% sejak tahun 2020. Perihal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang efisien dalam melaksanakan pembayaran pajak, sebab perusahaan lebih tinggi membayar jumlah pajak dibanding dengan tarif pajak yang sepatutnya. Oleh karena itu, untuk perusahaan yang membayar pajak lebih tinggi akan menganggap pajak selaku suatu beban yang dapat kurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sehingga perusahaan hendak melakukan bermacam metode baik legal ataupun ilegal untuk menghindari pembayaran pajak.

Adapun dapat diketahui pada gambar 1.1 diatas peneliti melihat terdapatnya gap ataupun ketidaksesuaian dengan teori dari 23 perusahaan yang dijadikan sampel tersebut, ukuran perusahaan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 29,27% dari tahun sebelumnya sebesar 29,14%, sedangkan dilihat dari manajemen pajak mengalami penurunan dengan nilai sebesar 25,57% dari tahun sebelumnya sebesar 27,46%. Tarif tersebut terletak diatas tarif pajak normal yaitu sebesar 25% dan 22% pada tahun 2020. Tingkat utang perusahaan yang di proksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) terjadi pada tahun 2017. Tingkat utang mengalami penurunan dari 94,09% menjadi sebesar 75,33%, sedangkan manajemen pajak mengalami kenaikan dari 28,77% menjadi sebesar 31,86%. Profitabilitas yang di proksikan oleh *Return On Asset* terjadi pada tahun 2018. Di mana pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari 13,30% menjadi sebesar 16,67%, sedangkan manajemen pajak mengalami penurunan dari 31,86% menjadi sebesar 28,46%. Intensitas aset tetap terjadi pada tahun 2020. Di mana intensitas aset tetap pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30,00% dari tahun sebelumnya sebesar 33,11%, sedangkan untuk manajemen pajak mengalami penurunan pula sebesar 25,57% dari tahun sebelumnya sebesar 27,46%. Intensitas persediaan terjadi pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 20,49% dari tahun sebelumnya sebesar 22,11%, sedangkan manajemen pajak mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 31,86% dari tahun sebelumnya sebesar 28,77%.

Dalam perihal penghindaran pajak, perusahaan bukan enggan untuk turut melakukan kegotoroyongan nasional melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang hendak dibayarkan kurang dari jumlah yang sepatutnya (Mangoting, 1999). Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah (Warsini, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa peneliti, diantaranya dilakukan oleh Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan fasilitas

perpajakan terhadap manajemen pajak. Pada penelitian ini manajemen pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan Ln (total aset), tingkat utang diukur dengan menggunakan *Debt To Asset Ratio* (DAR), profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA), intensitas persediaan diukur dengan total persediaan dibagi total aset, intensitas aset tetap diukur dengan total aset tetap dibagi total aset dan fasilitas perpajakan diukur dengan variable *dummy*. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Sedangkan profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen, lokasi penelitian, periode dan alat ukur. Variabel independen pada penelitian ini tidak menggunakan fasilitas perpajakan, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan fasilitas perpajakan. Lokasi penelitian terdahulu meneliti perusahaan manufaktur dengan rentang waktu 2011-2012, sedangkan pada penelitian ini pada sektor industri barang konsumsi dengan rentang waktu 2016-2020. Alat ukur yang digunakan penelitian terdahulu untuk manajemen pajak menggunakan GAAP ETR dan tingkat utang menggunakan *Debt To Asset Ratio* (DAR) sedangkan penelitian ini manajemen pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan tingkat utang menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER). Berbeda dalam lokasi penelitian, periode dan alat ukur berbeda pula hasil penelitiannya. Terlebih penelitian itu, memang harus diulang agar menemukan hasil yang sesuai dengan data terbaru yang diperoleh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta adanya hasil penelitian terdahulu dan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020.**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut:

1. Fenomena Manajemen Pajak terjadi pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Akasha Wira International Tbk. PT Kimia Farma Tbk melakukan *markup* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001, perusahaan mengatakan sukses mendapatkan laba sebesar Rp 132 miliar. Tetapi, perusahaan sesungguhnya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 99 miliar. Sedangkan PT Akasha Wira International Tbk, kasus ini terungkap ketika manajemen baru PT Ades menemukan adanya inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan periode 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama.
2. Peneliti melihat terdapatnya gap ataupun ketidaksesuaian dengan teori dari 23 perusahaan yang dijadikan sampel tersebut, ukuran perusahaan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 29,27%. Tingkat utang terjadi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 75,33%. Profitabilitas terjadi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,67%. Intensitas aset tetap terjadi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30,00%. Intensitas persediaan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 20,49%.
3. Terdapat kesenjangan antara teori dari penelitian terdahulu dengan keadaan sebenarnya yang terdapat pada grafik nilai rata-rata antara variabel X dengan variabel Y. Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian terhadap variabel *size*, *leverage*, *profitability*, *Inventory intensity*, intensitas aset tetap dan fasilitas perpajakan menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga penulis ingin menguji kembali dengan menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sesuai dengan latar belakang dan fenomena yang terjadi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
2. Apakah Tingkat Utang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
3. Apakah Profitabilitas dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

4. Apakah Intensitas Aset Tetap dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
5. Apakah Intensitas Persediaan dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
6. Apakah ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan secara bersama-sama dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi yang relevan mengenai penelitian “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”. Selain itu, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor dan menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari selama bangku kuliah. Pembahasan dalam penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak, kemudian menyimpulkan hasil mengenai hubungan variabel-variabel yang diteliti.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Ukuran Perusahaan dapat memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Tingkat Utang dapat memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Profitabilitas dapat memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Intensitas Aset Tetap dapat memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

5. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Intensitas dapat memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
6. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan secara bersama-sama dapat memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

1.4 Kegunaan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran kepada pemerintah, manajemen pajak, dan investor atau kreditor bagaimana ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan memengaruhi tarif pajak efektif sebuah perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kegunaan akademis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi
3. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh dari iuran wajib rakyat yang ketentuannya diatur oleh UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2019) adalah “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, ataupun perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut waluyo (2017) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 1 (satu) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Menurut Resmi (2019) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan

terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas”.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting bagi negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara.

Menurut Mardasimo (2018), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulurend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment* yaitu:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2020), subjek pajak terdiri dari:

1. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

2.1.6 Objek Pajak

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi,2019).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi objek PPh badan dapat berupa:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan dan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih besar karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh final untuk pajak yang tidak dipotong lagi dapat berupa:

1. Penghasilan dari bunga deposito
2. Tabungan
3. Diskonto
4. Hadiah undian
5. Transaksi saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh yang bukan merupakan objek pajak dapat berupa:

1. Bantuan / Sumbangan. Harta hibah yang diterima saudara sedarah
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima badan
4. imbalan dalam bentuk natura dari Wp
5. Asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan, dwiguna dan beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi
6. Deviden yang berasal dari cadangan laba ditahan. PT. BUMN, BUMD yang meneriam deviden
7. Dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja / pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

9. Bagian laba yang diperoleh dari peseroan komanditer
10. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian
11. Penghailan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan psangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di indonesia

2.2 Manajemen Pajak

2.2.1 Definisi Manajemen Pajak

Menurut Halim (2016) manajemen pajak ialah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan memakai strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak adalah salah satu elemen dari manajemen perusahaan.

Menurut Permatasari dalam Liani Fatni Suarningrat dan Putu Ery Setiawan (2013), Manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan supaya kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, supaya jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan se-efisien mungkin untuk bisa memperoleh keuntungan yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat memunculkan sanksi perpajakan.

Dari beberapa definisi manajemen pajak diatas bisa disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang harus dibayar sanggup ditekan serendah mungkin untuk menerima keuntungan dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Minnick dan Noga (2010), tujuan manajemen pajak yaitu untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan bisa tercapai. Manajemen pajak akan mempunyai manfaat atau nilai guna yang besar jika perusahaan bisa melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, diharapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi.

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau penggelapan pajak (*tax evasion*):

1. Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan supaya dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada

umumnya fokus perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimumkan kewajiban pajak. Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut Halim (2016):

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Ardyansah (2014) penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar aturan dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak menggunakan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran anggaran yang mengatur mengenai pajak, sehingga perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Halim (2015), menyebutkan 3 karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak adalah usaha meminimalkan penghindaran pajak, namun melanggar hukum yang berlaku tentang perpajakan. Sehingga penggelapan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Manajemen pajak juga bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang sepatutnya telah dimulai saat sebelum suatu usaha dimulai. Penerapan manajemen perpajakan harus ekonomis, efektif serta efisien. Manajemen pajak dalam penelitian ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal ataupun melanggar

norma-norma perpajakan yang sudah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara.

Mekanisme efisiensi melalui Manajemen Pajak dapat dilaksanakan bila manajemen dalam pengelolaan serta pelaksanaan di perusahaan dapat diterapkan dengan baik. Manajemen pajak adalah salah satu elemen dari manajemen perusahaan. Manajemen Pajak memiliki dua tujuan, yaitu mempraktikkan peraturan pajak secara benar serta usaha efisiensi untuk menggapai laba seharusnya. Suandy dalam Suhendri (2016) menjelaskan bahwa tujuan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

2.1.2 Pengukuran Manajemen Pajak

Menurut Iqbal Nul Hakim (2013), cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan ialah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Secara universal motivasi dilakukannya manajemen pajak yaitu untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan menggunakan tarif pajak efektif.

Tarif pajak efektif pada dasarnya merupakan suatu persentase besaran tarif pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan memakai tarif pajak efektif selaku salah satu acuan pada penetapan kebijakan sistem perpajakan perusahaan (Kurniasari, 2019). Tarif pajak efektif juga merupakan salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Digunakannya tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak karena tarif pajak efektif memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 20% maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Tarif pajak efektif adalah proksi yang paling banyak dipakai dalam penelitian terdahulu. Tarif pajak efektif telah menjadi cara umum untuk meringkas sistem pajak perusahaan dengan statistik yang sederhana dan sering digunakan oleh para pembuat kebijakan.

Terdapat tiga jenis proksi yang umum digunakan untuk mengetahui nilai Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) perusahaan menurut Rahmi (2019) yaitu:

1. GAAP ETR

GAAP ETR adalah rate yang mempengaruhi keuntungan akuntansi strategi pajak yang tidak menanggukhan pajak, tidak bisa mengubah GAAP ETR. GAAP ETR merupakan perhitungan tarif pajak efektif didasarkan pada *General Accounting Principle* (GAAP). Metode ini menghitung tarif pajak efektif melalui perbandingan total beban pajak (beban pajak kini dan tangguhan) dengan penghasilan kena pajak. Rego (2003) menyatakan bahwa GAAP ETR dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

2. *Cash* ETR

Cash ETR merupakan perhitungan tarif pajak efektif yang didasarkan pada kondisi sebenarnya. Metode ini menghitung tarif pajak melalui rasio antara besar pajak yang dibayarkan dengan penghasilan kena pajak. Pada metode ini, nilai penghasilan kena pajak juga mengacu pada aturan akuntansi. Ardyansah (2014) menyatakan bahwa *Cash* ETR dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Perbedaan dari kedua metode diatas terletak pada tujuan perhitungan tarif pajak efektif. Metode GAAP ETR dapat membantu pemilik perusahaan mengetahui kepentingan manajer terkait pengurangan beban pajak untuk tujuan akuntansi keuangan, sedangkan *CASH* ETR dapat membantu pemilik perusahaan untuk mengetahui kepentingan manajer terkait pengurangan pajak yang dibayarkan.

3. *Current* ETR

Current ETR mengukur total beban pajak dikurangi pajak tangguhan. Pengukuran ini berguna untuk melihat nilai ETR perusahaan atas beban pajak saat ini. Hanlon (2010) menyatakan bahwa *Current* ETR dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CuETR} = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi *CASH* ETR, karena perhitungan metode tersebut relatif mudah dan berguna untuk mengukur seberapa baik nilai ETR dalam sebuah perusahaan dan berguna untuk mengukur pendapatan dari pemilik modal dan pendapatan pemerintah (Ardyansah, 2014). Sehingga rumus dari ETR sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Pembayaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembayaran pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan arus kas konsolidasian, sedangkan laba sebelum pajak terdapat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Cash ETR digunakan dalam banyak literatur karena dapat menunjukkan aktivitas penghindaran pajak secara lebih luas termasuk pemindahan pendapatan dari negara dari pajak yang tinggi ke negara dengan tarif yang rendah, investasi dalam aset yang menguntungkan secara pajak, mempercepat pengurangan penyusutan kredit pajak dan lain sebagainya.

2.2 Ukuran Perusahaan

2.2.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar ataupun kecilnya perusahaan. Perusahaan yang dikatakan selaku perusahaan besar apabila jumlah aset yang dimilikinya pula besar, demikian pula sebaliknya perusahaan yang dikatakan kecil apabila total aset yang dimilikinya kecil (Isnaeni, 2020).

Ukuran perusahaan ialah peningkatan dari realitas bahwa perusahaan besar akan mempunyai kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar serta laba yang tinggi, sebaliknya pada perusahaan kecil akan mempunyai kapitalisasi pasar kecil, nilai buku yang kecil serta laba yang rendah (Richita Putri, 2018). Perusahaan besar merupakan perusahaan yang mempunyai total aset dalam jumlah besar, perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, sebaliknya perusahaan yang mempunyai total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Ada dua metode penghitungan nilai kekayaan perusahaan ialah dengan melihat total aset ataupun nilai perusahaan. Total aset adalah total nilai buku dan aset menurut catatan akuntansi sedangkan total nilai perusahaan merupakan total nilai pasar segala komponen struktur keuangan.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung mempunyai sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang mempunyai skala lebih kecil untuk melaksanakan manajemen pajak (Noor *et al.*, 2007). Dalam perpajakan dibutuhkan sumber daya yang ahli supaya manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat optimal sehingga dapat menekan biaya pajak perusahaan. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat maksimal dalam manajemen pajak disebabkan kekurangan ahli dalam perpajakan. Dengan artian kian banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang mampu diminimalisir oleh perusahaan.

Dalam UU RI No.20 Tahun 2008 telah dijelaskan tentang ketentuan ukuran perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar (Yuliatin, 2019). Keempat jenis perusahaan tersebut adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp10.000.000.000, (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan Rp50.000.000.000,

Berdasarkan pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan dapat dilihat menurut banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perolehan keuntungan. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, umumnya akan memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan tinggi lantaran didukung oleh aset yang besar sehingga hambatan perusahaan dapat teratasi. Perusahaan yang mempunyai total aset besar menampakan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai tahap kedewasaan dimana pada tahap ini arus kas perusahaan telah positif dan dianggap mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

2.2.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini indikator Ukuran Perusahaan diukur menggunakan Logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Logaritma natural (Ln) dipakai untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka berdasarkan jumlah aktiva dibentuk logaritma natural yang bertujuan untuk menciptakan data jumlah aktiva terdistribusi secara normal (Mita Tegar Pribadi, 2018).

Nilai total aset biasanya bernilai lebih besar dibandingkan memakai variabel keuangan lainnya, maka variabel total aset diperhalus sebagai Log aset atau Ln Total aset. Dengan menggunakan *Logaritma natural* (Ln) dari total aset dengan nilai ratusan

miliar bahkan triliun akan disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari total asset yang sesungguhnya.

Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus yang digunakan oleh Ardyansyah dan Zulaika (2014)

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Natural log (Ln) pada penelitian ini digunakan guna mengurangi naik turunnya data yang berlebihan tanpa harus mengubah perbandingan pada nilai sebenarnya. Total asset mendeskripsikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang mampu dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak. Semakin meningkat total aset maka semakin meningkat sumber daya yang dimiliki perusahaan guna digunakan untuk melakukan manajemen pajak sehingga meminimalkan tarif pajak efektifnya.

2.3 Tingkat Utang

2.3.1 Definisi Tingkat Utang

Menurut Yuda Aditya Prakoso (2018) “*Leverage* ialah banyaknya jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dalam melaksanakan pembiayaan serta dapat digunakan untuk mengukur besarnya aset yang dibiayai oleh utang.”. Utang adalah sumber dana yang memunculkan beban tetap keuangan, merupakan bunga yang wajib dibayar tanpa memperdulikan tingkatan laba perusahaan. Manajemen perusahaan wajib dapat mengatur utang dalam perusahaan yang tujuannya supaya menguntungkan serta menghindari kerugian akibat timbulnya utang.

Menurut Mamduh dan Abdul (2018) menyatakan bahwa “utang merupakan pengorbanan ekonomi yang bisa timbul di masa mendatang yang dari kewajiban perusahaan saat ini untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi ataupun peristiwa di masa lalu”.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. Pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang dan jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Pada pasal 2 ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1) antara utang dan modal, yang artinya apabila suatu perusahaan melewati batas wajar maka perusahaan dikategorikan memanfaatkan utang.

Tarif objek pajak penghasilan yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah diatur pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro (kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito di bawah Rp7.000.000) sebesar 20%
2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (kecuali bunga di bawah Rp240.000 tidak dikenakan pajak) kena PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%.
3. Bunga obligasi (surat utang negara) dan SUN lebih dari 12 bulan. Ketentuan tarif ini sesuai Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Tahun 2009. Berikut rincian tarif pajaknya:
 - 15%: untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT
 - 20%: untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B
 - 15%: untuk diskonto dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai BUT (Penghasilan dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
 - 20%: untuk diskonto dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B (Penghasilan dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
 - 15%: untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT (Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
 - 20%: untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B (Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
 - 0%: untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawal Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 – 2010
 - 5%: untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak
 - 15%: untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana yang terdaftar pada Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya
4. Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 10%.
5. Hadiah undian sebesar 25% seperti diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.
6. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa sebesar 2,5% dari margin awal sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.
7. Transaksi penjualan sahan pendiri

- 0,5%: untuk transaksi penjualan saham pendiri, yang diatur dalam PP No. 14 Tahun 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ/14/1997.
 - 0,1%: untuk transaksi penjualan bukan saham pendiri
8. Jasa konstruksi diatur dalam Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Tahun 2008 jo PP No. 40 Tahun 2009.
 - 2%: untuk pelaksana jasa konstruksi kecil
 - 4%: untuk pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi
 - 3%: untuk pelaksana jasa konstruksi sedang dan besar
 - 4%: untuk perancang atau pengawal jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi bersertifikasi usaha
 - 6%: untuk perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi bersertifikasi usaha
 9. Persewaan atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP No. 71 Tahun 2008.
 10. Pengalihan hak atas tanah/bangunan dan RSS dan Rumah Susun
 - 5%: untuk wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha real estate (kecuali pengalihan oleh WP Pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp60.000.000, penjualan, tukar-menuka, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus).
 - 1%: untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
 11. Transaksi penjualan saham pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura sebesar 0,1% sebagaimana diatur dalam PP No. 4 Tahun 1995.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, Pengurangan / biaya yang diperkenankan / biaya *deductible*:

1. Biaya untuk mendapatkan penghasilan
2. Penyusutan & amortisasi
3. Iuran dan pensiun yang disahkan oleh menteri keuangan
4. Kerugian karena penjualan / penghasilan harta yang dimiliki
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian & pengembangan
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
9. Kerugian tahun-tahun sebelumnya dengan batas waktu maksimal 5 tahun
10. PTKP bagi WP dalam negeri (WPDN) orang pribadi

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, Pengurangan / biaya yang tidak diperkenankan / *non deductible expense*:

1. Pembagian laba
2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi
3. Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih
4. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa yang dibayar WP orang pribadi
5. Imbalan dalam bentuk natura
6. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
7. Harta yang dihibahkan, bantuan, warisan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
10. Gaji yang dibayarkan
11. Sanksi admin berupa bunga, denda, kenikmatan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan pajak

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan utang merupakan kewajiban yang wajib dibayar oleh perusahaan dengan aset ataupun jasa pada suatu dikala tertentu di masa yang akan datang dari transaksi ataupun kejadian di masa lalu, serta utang dapat diartikan sebagai tagihan para kreditur kepada perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang yang lebih banyak memiliki nilai tarif pajak efektif yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin banyak penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan maka semakin baik tarif pajak efektif yang dihasilkan oleh perusahaan ditandai dengan semakin rendahnya tarif pajak efektif.

2.3.2 Pengukuran Tingkat Utang

Salah satu indikator dalam menilai utang perusahaan adalah dengan menggunakan rasio untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Kasmir (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat utang perusahaan, antara lain yaitu:

1. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Menurut Kasmir (2017) *debt to assets ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Menurut Kasmir (2017) *debt to equity ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Long term Debt to Equity Ratio* (LTDiER)

Rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang. Menurut Kasmir (2017) (LTDiER) dapat dihitung menggunakan rumus.

$$\text{LTDiER} = \frac{\text{Total Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. *Times Interest Earned Ratio* (TIE)

Rasio yang menerangkan kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Menurut Kasmir (2017) TIE dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{TIE} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

Dalam penelitian ini, peneliti memakai rasio *debt to equity ratio* (DER). Menurut Kurniasari (2019) *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat mengindikasikan proporsi utang sebagai sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan dibandingkan proporsi modal ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjaman (kreditor) dengan pemilik saham perusahaan. Rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) ini adalah:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Keterangan:

DER = *Debt to Equity Ratio*

Total utang yang digunakan untuk menghitung rasio utang merupakan total utang perusahaan yang tertera dalam neraca baik utang jangka pendek serta jangka panjang. Total ekuitas yang digunakan untuk menghitung rasio utang di sini merupakan total ekuitas perusahaan yang tertera dalam neraca.

Tingkat Utang yang diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Ini adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan serta pelunasan atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada. Semakin tinggi nilai DER maka kondisi perusahaan semakin berisiko. (Afifah dan Hasymi, 2020)

2.4 Profitabilitas

2.4.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Rodriguez dan Arias dalam Yuda Aditya Prakoso (2018) profitabilitas merupakan keahlian perusahaan untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan dan merupakan indikator dari keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas ialah aspek penentu beban pajak, sebab perusahaan dengan laba yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkatan laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah ataupun bahkan tidak membayar pajak jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang wajib dibayar pada tahun selanjutnya.

Ghozali dan Chariri (2011) menjelaskan laba akuntansi adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Penafsiran pendapatan dalam akuntansi keuangan merupakan peningkatan jumlah aset ataupun penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan ataupun jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah memperoleh laba ataupun merugi dari aktivitas usaha perusahaan. Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memkasimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan.

Perusahaan yang menerima penghasilan ataupun memperoleh laba dari aktivitas usahanya di haruskan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2017 pasal 1 menerangkan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan ditetapkan oleh penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan mempengaruhi pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007).

Subjek Pajak:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan & mempunyai niat tinggal di indonesia
 - b. Badan usaha yang didirikan di indonesia
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Subjek Pajak Luar Negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - b. Badan yang tidak didirikan di indonesia yang menerima penghasilan dari indonesia bukan melakukan bentuk usaha tetap di indonesia

Sesuai Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan terbaru dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tarif Umum
 - Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
 - Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025
2. Tarif Khusus

Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama periode tertentu. Semakin besar nilai profitabilitas menandakan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan dan meningkat perolehan laba perusahaan. Sehingga menghasilkan beban pajak seminimal mungkin, tujuan langkah ini adalah agar profit perusahaan terlihat baik serta untuk meyakinkan pihak participial di dalam perusahaan agar terhindar dari konflik keagenan. Profitabilitas adalah salah satu variabel yang relatif penting, karena melalui profitabilitas akan mengetahui keputusan yang akan diambil apakah keuntungan perusahaan didistribusikan menjadi deviden, ditahan untuk kepemilikan uang tunai atau dipakai untuk melakukan investasi dengan harapan perusahaan akan memperoleh laba pada masa yang akan datang.

2.4.2 Pengukuran Profitabilitas

Dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan terdapat beberapa rasio yang umumnya dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menilai efektivitas manajemen perusahaan dalam usahanya meningkatkan profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah proporsi yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas organisasi dalam mencari manfaat atau laba. Proporsi ini juga dapat memberikan penjelasan tentang besr kecilnya derajat kelangsungan hidup para manajemen dalam suatu perusahaan atau instansi. Kenyatannya pemanfaatan proporsi ini menunjukkan efektivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut (Sugiyono dan Untung, 2016)

berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menghasilkan laba.

1. *Return On Assets* (ROA)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Selain itu, rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. ROE adalah salah satu indikator yang dipakai pemegang saham untuk mengukur keberhasilan usaha yang dijalani. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$ROE = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Rasio ini menampakan berapa besar laba kotor yang diperoleh dari menjual produk. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Menurut Sugiyono (2016) rasio *net profit margin* dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

5. *Cash Flow Margin*

Rasio ini menunjukkan aliran kas dari hasil operasi terhadap penjualan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengganti penjualan menjadi aliran kas. Cash flow margin dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Arus Kas Hasil Operasi}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* memiliki fungsi sebagai pengatur seberapa keefektifitasan perusahaan dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Menurut Chen et al (2010) dalam Ahmad (2019) *Return on Assets* (ROA) adalah salah satu indikator bagi perusahaan dalam mengukur kesuksesan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki peluang dalam melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Menurut Kasmir (2017) rumus dari *Return on Assets* yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

ROA = *Return On Asset*

Laba bersih setelah pajak yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA merupakan laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan. Untuk total aset, digunakan total aset baik aset lancar ataupun aset tidak lancar yang tercantum dalam neraca.

Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) ialah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. Di dalam pajak, perihal tersebut dijadikan dasar pengenaan pajak yang hendak dikenakan terhadap perusahaan. Dimana semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta tarif pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan (Afifah dan Hasymi, 2020).

2.5 Intensitas Aset Tetap

2.5.1 Definisi Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap ialah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki setiap perusahaan. Aset Tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk melaksanakan operasionalnya sehingga dengan menggunakan aset kinerja perusahaan akan optimal serta memperoleh laba yang maksimal (Selvia, 2020). Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut. Beban depresiasi tersebut akan menjadi pengurang terhadap pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai nilai aset tetap dibandingkan nilai aset yang tinggi membayar pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang memiliki nilai aset tetap yang rendah, sebab terdapat biaya penyusutan ataupun depresiasi pada aset tetap

(Wardani dan Hany, 2018). Aset juga dapat menggambarkan ukuran perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan.

UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memuat perubahan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi yang ada dalam UU Pajak Penghasilan (PPH).

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1), penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Harta berwujud itu kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Selain itu, harta berwujud itu dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2), penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Penghitungan dilakukan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Dalam Pasal 11 ayat (6a) disebutkan apabila bangunan permanen mempunyai masa manfaat lebih 20 tahun, penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak.

Berdasarkan pada Pasal 11a ayat (1), amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Penghitungan dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku. Kemudian, pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya itu termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill). Harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya itu dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Dalam Pasal 11a ayat (2a) disebutkan apabila harta tak berwujud mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun, amortisasi dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak.

Aset dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu Aset Lancar dan aset Tetap. Aset Lancar (*current asset*) merupakan aset perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan serta memiliki umur ekonomis paling lama satu tahun dalam siklus aktivitas perusahaan yang normal (Nafarin dalam Darmadi, 2013). Aset Tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus aktivitas yang normal. PSAK No. 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.5.2 Pengukuran Intensitas Aset Tetap

Proporsi intensitas aset tetap mengilustrasikan perbandingan total aset tetap perusahaan pada total aset yang perusahaan miliki, sesuai dengan rumus yang digunakan Ardyansah dan Zulaikha (2014).

$$IAT = \frac{\text{TotalAsetTetap}}{\text{Total Aset}}$$

Total aset tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam neraca mencakup tanah, bangunan dan peralatan. Total aset pada penghitungan intensitas aset tetap memakai nilai total aset perusahaan yang tercantum pada neraca perusahaan.

2.6 Intensitas Persediaan

2.6.1 Definisi Intensitas Persediaan

Menurut Ardyansah (2014) Intensitas persediaan merupakan bagian dari *capital Intensity Ratio* yang adalah kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Intensitas persediaan ataupun *Inventory Intensity* menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki pada persediaan (Darmadi, 2013). Perusahaan yang mempunyai jumlah persediaan yang besar memerlukan biaya yang besar untuk mengendalikan persediaan yang ada. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan serta diakui selaku beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan hendak membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

Perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan sebab persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur, sebab saat sebelum persediaan digunakan maka sumber dana yang terikat didalamnya tidak dapat

digunakan untuk keperluan yang lain (Herjanto, 2007). Dalam teori agensi, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan

Perusahaan yang mempunyai jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Herjanto (2007) menjelaskan bahwa jumlah persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan risiko kerusakan barang yang lebih besar. PSAK No. 14 tahun 2017 menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan serta diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menimbulkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan keuntungan, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan keuntungan yang diterima oleh perusahaan.

Metode yang digunakan dalam menilai persediaan dalam akuntansi yaitu:

- *First In First Out* (FIFO)
- *Last In First Out* (LIFO)
- *weighted average* (WAC)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) yang berbunyi "Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama." Penjelasan atas ayat tersebut yaitu, Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*First In First Out*-FIFO) dan merata-ratakan nilai persediaan (*weighted average*). Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika wajib pajak telah memilih salah satu metode di atas dalam menilai persediaannya maka wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya.

2.6.2 Pengukuran Intensitas Persediaan

Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset (Richardson dan Lanis,

2007). Rasio ini bisa digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.

$$INV = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Total aset dalam penghitungan intensitas persediaan menggunakan nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan. Persediaan yang digunakan dalam penghitungan merupakan persediaan yang tercantum dalam neraca.

2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.7.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan. Berikut ini ringkasan penelitian terdahulu yang diuraikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • Tingkat Utang • Profitabilitas • Intensitas Aset Tetap • Intensitas Persediaan • Fasilitas Perpajakan <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pajak 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X1: Ln (TA) • X2: DAR - Total utang - Total aset • X3: ROA - Laba sebelum pajak - Total aset • X4: IAT - Total aset tetap - Total aset • X5: INV - Persediaan - Total aset • X6: Dummy - 1: mendapat fasilitas pajak - 0: tidak mendapat fasilitas pajak <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y: ETR - Beban pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistic deskriptif • Uji asumsi klasik • Uji hipotesis 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan, tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Sedangkan profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.</p>

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			- Laba sebelum pajak		
2	Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Inventory Intensity</i> Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Size</i> • <i>Leverage</i> • <i>Profitability</i> • <i>Inventory Intensity</i> • Komisaris independen <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pajak 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X1: Ln (TA) • X2: DAR - Total utang - Total aset • X3: ROA - Laba sebelum pajak - Total aset • X4: INV - Persediaan - Total aset • X5: INDEP - Jumlah komisaris - Jumlah dewan komisaris <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y: ETR - Beban pajak - Laba sebelum pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistik deskriptif • Uji hipotesis 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>size</i> , <i>leverage</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan <i>Profitability</i> dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.
3	Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • <i>Size</i> • <i>Capital Intensity Ratio</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pajak 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X1: ROA - Laba sebelum pajak - Total aset • X2: DER - Total utang - Total ekuitas • X3: Ln (TA) • X4: CIR - Total aset tetap - Total aset <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y: ETR - Beban pajak - Laba sebelum pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistik deskriptif • Uji analisis regresi linear berganda • Uji hipotesis 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>size</i> dan <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
4	Indra Suyoto Kurniawan (2019) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total Aset • Leverage • Intensitas Aset Tetap • Kepemilikan Institusional • Komisaris Independen • Intensitas Persediaan 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X1: Ln (TA) • X2: DAR - Total utang - Total aset • X3: IAT - Total aset tetap - Total aset • X4: Kepemilikan institusional - Lembar saham yang dimiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistik deskriptif • Uji hipotesis 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total aset dan intensitas persediaan berpengaruh negative terhadap manajemen pajak.

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah saham yang diterbitkan X5: INDEP Jumlah komisaris Jumlah dewan komisaris X6: INV Persediaan Total aset Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Y: ETR Beban pajak Laba sebelum pajak 		Sedangkan <i>leverage</i> , intensitas asset tetap, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
5	Ellena Sukma Aryanti dan Masfar Gazali (2019) Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017.	Independen: <ul style="list-style-type: none"> Keuntungan Perusahaan Tingkat Utang Aset Tetap Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pajak 	Independen: <ul style="list-style-type: none"> X1: ROA Laba sebelum pajak Total aset X2: DER Total utang Total ekuitas X3: Aset tetap = total nilai asset tetap bersih Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Y: ETR Beban pajak Laba sebelum pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Uji statistik deskriptif Uji hipotesis 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan, tingkat utang dan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.
6	Eva Fauziah Ahmad (2019) Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI 2013-2017	Independen: <ul style="list-style-type: none"> Profitabilitas <i>Capital Intensity</i> <i>Inventory Intensity</i> Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <i>Effective Tax Rate</i> 	Independen: <ul style="list-style-type: none"> X1: ROA Laba setelah pajak Total Aset X2: CAP Bersih Total Aset X3: INV Total Persediaan Total Aset Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Y: GAAP ETR 	<ul style="list-style-type: none"> Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> .

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			- Beban Pajak Penghasilan - Laba Sebelum Pajak		
7	Erni Kumiasari dan Listiawati, (2019) Profitabilitas dan <i>Leverage</i> dalam Mempengaruhi <i>Effective Tax Rate</i>	Independen: • Profitabilitas • <i>Leverage</i> Dependen: • Tarif Pajak Efektif	Independen: • X1: ROA - Laba setelah pajak - Total Aset • X2: DER - Total Liabilitas - Total Ekuitas Dependen: • Y: ETR - Beban pajak penghasilan - Laba sebelum pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistik deskriptif • Uji asumsi klasik • Analisis linier berganda • Uji hipotesis 	Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> , sedangkan variabel <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> .
8	Astrinur Rahmawati, Ati Sumiati dan Sri Zulaihati (2020) <i>The Influencing Factors Of Tax Management In Go Public Companies On The Indonesia Stock Exchange</i>	Independen: • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan • Intensitas Modal Dependen: Manajemen Pajak	Independen: • X1: ROA - Laba sebelum pajak - Total aset • X2: DER - Total utang - Total ekuitas • X3: Ln (TA) • X4: CAP - Total aset bersih - Total aset Dependen: • Y: ETR - Beban pajak - Laba sebelum pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Uji analisis persyarat an • Uji asumsi klasik • Uji regresi berganda • Uji hipotesis 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak.
9	Selvia Azura (2020) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Independen: • <i>Size</i> • <i>Leverage</i> • Profitabilitas • Intensitas Persediaan • Intensitas Aset Tetap • Komite Audit Dependen: • Manajemen Pajak	Independen: • X1: Ln (TA) • X2: DER - Total utang - Total ekuitas • X3: ROA - Laba sebelum pajak - Total aset • X4: INV - Persediaan - Total aset • X5: IAT - Total aset tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistik deskriptif • Uji asumsi klasik • Uji regresi data panel • Uji hipotesis 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>size</i> , <i>leverage</i> , intensitas persediaan dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan Profitabilitas

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Indonesia Tahun 2016-2019)		<ul style="list-style-type: none"> X6: Komite audit = jumlah komite audit Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Y: ETR - Beban pajak - Laba sebelum pajak 		dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
10	Shilvi Yunia, (2020) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Tingkat Utang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator ETR pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Corporate Governance</i> • Profitabilitas • Tingkat Hutang Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pajak 	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • X1: GCG: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Komisaris - Total anggota dewan komisaris • X2: ROA <ul style="list-style-type: none"> - Laba setelah pajak - Total aset • X3: DAR <ul style="list-style-type: none"> - Total Utang - total aset Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Y: ETR - Beban pajak - laba sebelum pajak 	Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas dan tingkat utang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator ETR.

(Sumber: Data Sekunder diolah oleh penulis, 2021).

Berikut penjelasan lebih ringkas dari tabel 2.1 diatas:

Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel Independen	Manajemen Pajak	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Ukuran Perusahaan	1. Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) 2. Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) 3. Indra Suyoto Kurniawan (2019)	1. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) 2. Selvia Azura (2020)
Tingkat Utang	1. Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) 2. Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) 3. Indra Suyoto Kurniawan (2019) 4. Ellena Sukma Aryanti dan Masfar Gazali (2019) 5. Erni Kurniasari dan Listiawati, (2019) 6. Shilvi Yunia, (2020)	1. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) 2. Selvia Azura (2020) 3. Astrinur Rahmawati, Ati Sumiati dan Sri Zulaihati (2020)

Variabel Independen	Manajemen Pajak	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Profitabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) 2. Steffi Efata Wijaya dan MeiriskaFebrianti (2017) 3. Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) 4. Eva Fauziah Ahmad (2019) 5. Selvia Azura (2020) 6. Shilvi Yunia, (2020) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erni Kurniasari dan Listiawati (2019) 2. Astrinur Rahmawati, Ati Sumiati dan Sri Zulaihati (2020)
Intensitas Aset Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) 2. Indra Suyoto Kurniawan (2019) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selvia Azura (2020)
Intensitas Persediaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) 2. Indra Suyoto Kurniawan (2019) 3. Eva Fauziah Ahmad (2019) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) 2. Selvia Azura (2020)

(Sumber: Penelitian yang terkait diolah oleh penulis, 2021).

2.7.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian teori utama dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independent ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap variable dependen yaitu manajemen pajak.

2.7.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Ukuran perusahaan bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan total aset, total penjualan serta kapitalisasi pasar. Perusahaan berskala kecil tidak dapat maksimal dalam manajemen pajak disebabkan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika aktivitas manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menimbulkan hilangnya peluang perusahaan untuk mendapat *tax interactive* yang dapat kurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Menurut Ardyansah and Zulaikha (2014) perusahaan besar di dalam melaksanakan perencanaan pajak yang lebih baik, cenderung mempunyai ruang yang lebih luas. Salah satu metode yang bisa dilakukan perusahaan yaitu dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efisien untuk menurunkan tarif pajak efektif (ETR) sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) dan Indra Suyoto Kurniawan (2019) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.7.2.2 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak

Tingkat Utang ialah suatu indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan serta pelunasan atas kewajiban. Utang dapat dipakai oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan

dengan memanfaatkan biaya bunga utang. Bila biaya bunga utang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih memakai utang untuk pendanaan guna mendapatkan keuntungan berupa biaya bunga utang. Biaya bunga utang yang timbul hendak digunakan selaku pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan menerima laba peningkatan kompensasi. Menurut perpajakan biaya bunga ialah biaya *deductible expense*, yaitu biaya yang dapat kurangi besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sehingga perihal ini membuat tarif pajak efektif sebuah perusahaan akan rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) Shilvi Yunia, (2020) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.7.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas ialah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai profitabilitas maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut sehingga profitabilitas menjadi aspek penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Tingginya profitabilitas menyebabkan jumlah pajak yang wajib dibayar juga semakin meningkat karena perusahaan dianggap sukses dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menciptakan laba. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan efektivitas pajak guna meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) dan Shilvi Yunia, (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.7.2.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Menurut Mutia Dianti Afifah dan Mhd Hasymi (2020), Intensitas aset tetap ialah kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Proporsi aset tetap perusahaan bisa meminimalkan beban pajak terutang dari depresiasi aset tetap yang ditimbulkannya. Ardyansah dan Zulaikha (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi pula. Perihal tersebut disebabkan perusahaan memiliki aset tetap yang telah habis manfaat ekonominya, tetapi tidak dihentikan pengakuan sebagai aset tetap dan juga untuk aset bergerak yang dimiliki semacam kendaraan bila dibawa kembali oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan ataupun pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) dan Indra Suyoto Kurniawan (2019) yang menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.7.2.5 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

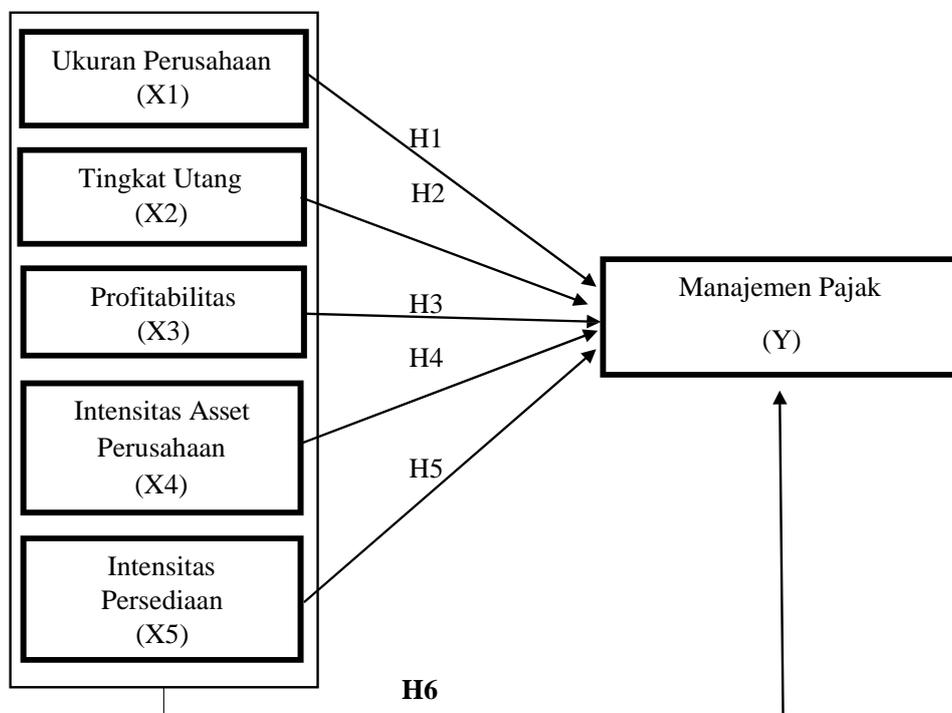
Intensitas persediaan mendeskripsikan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas persediaan dapat memunculkan biaya tambahan antara lain terdapatnya biaya penyimpanan serta biaya

yang timbul akibat terdapat kerusakan barang (Herjanto, 2007). PSAK No. 14 tahun 2017 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menimbulkan penurunan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) dan Indra Suyoto Kurniawan (2019) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.7.2.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Sebagaimana pembahasan diatas telah disampaikan mengenai pengaruh tiap-tiap variabel bebas yaitu Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap serta Intensitas Persediaan terhadap Variabel terikat yaitu Manajemen Pajak. Maka hasilnya adalah Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap serta Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nul Darmadi Hakim (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka disusun kerangka penelitian pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan statment tentang suatu yang untuk sementara waktu dianggap benar, tidak hanya itu, hipotesis dapat diartikan selaku statment yang hendak diteliti dan juga untuk jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Berdasarkan latar belakang penelitian, kerangka penelitian dan penjabaran yang dibuat penulis, maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- Hipotesis 2 : Tingkat Utang Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- Hipotesis 3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- Hipotesis 4 : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- Hipotesis 5 : Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak
- Hipotesis 6 : Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif yang dinyatakan dengan bentuk angka yang dalam perhitungannya memakai metode statistic dan merupakan data yang berskala rasio dan ukur interval. Penelitian kuantitatif yaitu menerangkan ataupun mencari hubungan/pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya yakni variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap serta intensitas persediaan, dan variabel dependen yaitu manajemen pajak. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang diperoleh dari populasi laporan keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek Penelitian ini yaitu meliputi variabel X (variabel independen) antara lain, Ukuran Perusahaan dengan indikator Ln (Total Aset) (X1), Tingkat Utang dengan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) (X2), Profitabilitas dengan indikator *Return On Asset* (ROA) (X3), Intensitas Aset Tetap dihitung dengan menggunakan Total Aset Tetap dibagi Total Aset (X4) serta Intensitas Persediaan dihitung dengan menggunakan Total Persediaan dibagi Total Aset (X5). Sedangkan untuk variabel Y (variabel dependen) yaitu Manajemen Pajak dengan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu *organization*, merupakan sumber data yang unit analisis nya bersumber pada data dari divisi organisasi/perusahaan pada suatu sektor tertentu. Dalam perihal ini unit analisis ialah data keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode 2016-2020, dengan memakai data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 dengan pengambilan data pada website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu (www.idx.co.id) dan IDNFinancials (www.idnfinancials.com), dan website tiap-tiap perusahaan untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan penulis dalam melaksanakan penelitian atas variabel-variabel tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersumber dari data sekunder, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah diaudit untuk periode 2016-2020. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) dan IDNFinancials (www.idnfinancials.com) dan website masing-masing perusahaan.

3.4 Operasional Variabel

Untuk mempermudah proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel - variabel penelitian ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut:

1. Variabel Independen (variabel tidak terkait/bebas) (X)

Variabel bebas (Independen Variabel) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi pemicu munculnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Ukuran Perusahaan (X1), Tingkat Utang (X2), Profitabilitas (X3), Intensitas Aset Tetap (X4) dan Intensitas Persediaan (X5)

2. Variabel Dependen (variabel terkait/tidak bebas) (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi ataupun akibat karena terdapatnya variabel independen, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Pajak.

Agar hubungan antar variabel jelas terlihat, maka kedua variabel tersebut dituangkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Independen	Ukuran Perusahaan (X1)	Total Aset	$\ln(\text{Total Aset})$	Rasio
	Tingkat Utang (X2)	DER	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
	Profitabilitas (X3)	ROA	$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
	Intensitas Aset Tetap (X4)	Total Aset Tetap	$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
	Intensitas Persediaan (X5)	Total Persediaan	$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Dependen	Manajemen Pajak (Y)	CETR	$\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

(Sumber: Tinjauan Pustaka yang Terkait diolah oleh penulis, 2021)

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini memakai sampel data sekunder yang diperoleh berdasarkan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria – kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria sampel dibutuhkan untuk menghindari munculnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil analisis. Terdapat 53 perusahaan yang berada dalam perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 23 perusahaan, namun terdapat data yang mengalami nilai yang terlalu ekstrim (*outlier*) yaitu sebanyak 7 perusahaan, sehingga diperoleh sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu sebanyak 16 perusahaan.

Adapun kriteria-kriteria perusahaan yang digunakan untuk menentukan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar berturut – turut di BEI selama periode penelitian tahun 2016-2020.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian tahun 2016-2020.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang mengalami tidak rugi sebelum pajak selama periode penelitian 2016-2020.
4. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya.
5. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki nilai terlalu ekstrim (*outlier*)

Tabel 3.2 Proses Seleksi Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

NO	KRITERIA	JUMLAH
	Jumlah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	53
1	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak terdaftar berturut – turut di BEI selama periode penelitian tahun 2016-2020.	(17)
2	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian tahun 2016-2020.	(1)
3	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang mengalami rugi sebelum pajak selama periode penelitian 2016-2020.	(12)
4	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya.	(0)
5	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki nilai terlalu ekstrim (outlier)	(7)
Jumlah Sampel Penelitian		16
Jumlah Tahun Observasi		5
Jumlah Data Penelitian		80

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021).

Setelah melakukan seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan yang memiliki kriteria sampel. Dengan tahun pengamatan 5 tahun berturut-turut, maka total sampel menjadi 80 sampel, yaitu 16 x 5 tahun observasi, dengan pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling*.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara menggali informasi berupa data sekunder, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi, memenuhi prosedur pengumpulan data serta informasi dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*) dan dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan

Penelitian untuk memperoleh data dan informasi dengan cara membaca buku-buku atau jurnal didalam perpustakaan ataupun secara online yang dapat dijadikan referensi dan sumber-sumber *literature* lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan IDNFinancials yaitu (www.idnfinancials.com).

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, ialah berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik. Analisis kuantitatif ditekankan untuk

mengungkapkan perilaku variabel penelitian (Sucherley, 2000). Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan data gabungan antara deret waktu (*time series*) serta data deret lintang (*cross section*). Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu Manajemen Pajak. Sementara variabel independen yaitu ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Office Excel* 2019 dan *Software Statistic Eviews* 10 yang merupakan suatu program untuk pengolahan data serta pengujian hipotesis. Pengolahan serta perhitungan data sekunder untuk variabel bebas akan diolah dan dihitung dengan menggunakan *Microsoft Office Excel* 2019. Berikutnya untuk memperoleh hasil yang baik maka perlu dilakukan beberapa uji asumsi klasik dengan menggunakan *eviews* 10.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range.

3.7.2 Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel ialah model analisis yang menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross-section*). Ada dua macam data panel yaitu data *balance panel* serta data *unbalance panel*, data *balance panel* yaitu keadaan dimana unit *cross-sectional* mempunyai jumlah observasi *time series* yang sama. Sedangkan data *unbalance panel* adalah keadaan di mana unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang tidak sama. Pada penelitian ini menggunakan data panel *balance panel*.

Model regresi ini mempunyai keunggulan sebab mempunyai parameter yang lebih banyak. Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linear berganda dengan data panel. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi di mana data dikumpulkan secara individu (*cross-section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*).

Pada penelitian ini terdapat lima variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam persamaan model regresi yaitu ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap serta intensitas persediaan. Sehingga persamaan model regresi panel yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

- Y_{it} = Variabel Manajemen Pajak
 α = Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi untuk Ukuran Perusahaan
 X_1 = Variabel Ukuran Perusahaan
 β_2 = Koefisien Regresi untuk Tingkat Utang
 X_2 = Variabel Tingkat Utang
 β_3 = Koefisien Regresi untuk Profitabilitas
 X_3 = Variabel Profitabilitas
 β_4 = Koefisien Regresi untuk Intensitas Aset Tetap
 X_4 = Variabel Intensitas Aset Tetap
 β_5 = Koefisien Regresi untuk Intensitas Persediaan
 X_5 = Variabel Intensitas Persediaan
 i = Entitas ke- i
 t = Periode ke- t
 ε = *Error*

3.7.3 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam teknik analisis data panel terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu *pooling Least Square (Common Effect)*, model *Fixed Effect*, dan model *Random effect*, sedangkan untuk memastikan metode mana yang lebih sesuai dengan penelitian ini maka digunakan Uji Chow, Uji Hausman serta Uji Langrange Multiplier (Mahulete, 2016).

3.7.3.1 Model Pooled (*Common Effect*)

Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) adalah teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Karena hanya menggunakan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam mengestimasi data panel.

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu juga waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama pada berbagai kurun waktu, menggunakan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu. Berdasarkan asumsi ini maka model CEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana i yaitu *cross-section* (individu) dan t yaitu periode waktunya. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses ditaksir secara terpisah untuk setiap unit *cross-section* dapat dilakukan.

3.7.3.2 Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* merupakan teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan juga intersepnnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini pula mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model *Fixed Effect* menggunakan teknik *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dengan Variabel *Dummy* dengan intersep diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel *dummy* ini sangat bermanfaat dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model *Fixed Effect* dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Model FEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{jt} + \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{kt} + \varepsilon_{it}$$

3.7.3.3 Model Efek Acak (*Random Effect*)

Pada model *Fixed Effect* terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*Degree Of Freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat memakai pendekatan estimasi *Random Effect*. Pendekatan estimasi *Random Effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstan dalam model *Random Effect* tidak lagi tetap, tetapi bersifat random. Persamaan model REM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{jt} + \varepsilon_{it} = \mu_i + V_{it} + W_{it}$$

Dengan $w_{it} = \varepsilon_{it} + \eta_{it}$, suku error gabungan w_{it} memuat dua komponen error yaitu ε_{it} komponen *error cross-section* serta unit yang merupakan kombinasi komponen *cross-section* serta *time series*.

Metode OLS tidak dapat digunakan untuk memperoleh *estimator* yang efektif untuk model *random effect*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* yaitu *Generalized Least Squares* (GLS) dengan asumsi homoskedastik serta tidak terdapat *Cross-sectional correlation*. Untuk memastikan model estimasi yang

hendak digunakan, maka dilakukan Uji *Chow-Test*, Uji *Hausman-Test* dan Uji *Langrange Multiplier-Test*.

3.7.4 Uji Kesesuaian Model

Dari ketiga model yang sudah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sinkron dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE). Untuk menguji kesesuaian ataupun kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Langrange Multiplier* (Mahulete, 2016).

3.7.4.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Common Effect*

H_1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross-section Chi-Square* $< \alpha = 0.05$, atau *probability (p-value) F Test* $< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan ialah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross-section Chi-Square* $> \alpha = 0.05$, atau *probability (p-value) F Test* $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan menolak H_1 atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan ialah metode *common effect*.

3.7.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Random Effect*

H_1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross-section random* $< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 atau metode yang digunakan ialah metode *fixed effect*. Tetapi, jika nilai *p-value cross-section random* $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan menolak H_1 atau metode yang digunakan ialah metode *random effect*.

3.7.4.3 Uji Langrange Multiplier

Uji *Langrange Multiplier* digunakan untuk memilih model *random effect* atau model *common effect* yang sebaiknya digunakan. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji *langrange multiplier* ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Metode *Common Effect*

H₁ : Metode *Random Effect*

Jika nilai *Breusch-Pagan both* $< \alpha = 0.05$, maka H₀ ditolak dan menerima H₁ atau metode yang tepat untuk regresi data panel ialah *random effect*. Jika nilai *Breusch-Pagan both* $> \alpha = 0.05$, maka H₀ diterima dan menolahkan H₁, atau metode yang tepat untuk regresi data panel ialah metode *common effect*.

3.7.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ialah uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi ketentuan untuk dianalisis lebih lanjut (Sugiyono, 2013). Untuk melakukan Uji Asumsi Klasik atas Data Sekunder ini, penelitian melakukan uji Normalitas Data, Multikolinieritas, Heteroskedesitas, dan Autokorelasi.

3.7.5.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi normal. Uji Normalitas Data bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel dependen juga independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data pada penelitian ini dilakukan menggunakan rumus *Kolmogorov-smirnov* (KS) menggunakan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$. Jika $\text{sig} > \alpha$ berarti residual terdistribusi normal. Apabila $\text{sig} < \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal.

3.7.5.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan keadaan di mana terjalin hubungan linier sempurna ataupun mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada ataupun tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang wajib terpenuhi dalam model regresi adalah tidak terdapatnya multikolinieritas.

Alat statistik yang kerap dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinieritas yakni dengan *variance inflation factor* (VIF), korelasi antara variabel - variabel bebas, ataupun dengan melihat *eigenvalues* serta *condition index* (CI). Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- 1 Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi namun secara individual variabel - variabel bebas banyak yang tidak signifikan memengaruhi variabel terikat.
- 2 Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka perihal ini adalah indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinieritas.

Sebagai alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinieritas ialah sebagai berikut:

1. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang memiliki korelasi yang tinggi.
2. Menambah jumlah observasi.
3. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*.

3.7.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dianggap Homoskedastisitas, dan apabila berbeda disebut Heterokedastisitas. Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Apabila Sig > 0,05 maka tidak terdapat tanda-tanda Heterokedastisitas.

Menurut Gujarat (1978) dalam Annisa (2017), menyatakan bahwa “adanya sifat heteroskedastisitas ini dapat membuat penaksiran dalam model bersifat tidak efisien”. Biasanya permasalahan heteroskedastisitas lebih biasa terjadi dalam data *cross-section* dibandingkan menggunakan *time series*.

3.7.5.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan kondisi di mana terbentuknya korelasi antara *residual* pada satu pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi muncul karena *residual* yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lain. Perihal ini di akibatkan karena *error* pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Permasalah autokorelasi kerap terjadi pada data *time series* (runtut waktu). Persyaratan yang wajib terpenuhi yakni tidak terdapatnya autokorelasi pada model regresi.

Untuk mendiagnosis terdapatnya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin -Watson (uji DW) Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi sebagai berikut:

- 1 Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif
- 2 Jika $d > (4 - dl)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
- 3 Jika $du < d < (4 - dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
- 4 Jika $dl < d < du$ atau $(4 - du)$, berarti tidak dapat disimpulkan

Beberapa metode untuk mengulangi permasalahan autokorelasi yaitu dengan mentransformasikan data ataupun dapat pula dengan mengganti model regresi ke dalam wujud persamaan beda universal (*generalized difference equation*). Tidak hanya itu pula bisa dilakukan menggunakan memasukkan variabel lag dan variabel terikat nya menjadi salah satu variabel bebas sehingga data observasi menjadi berkurang satu.

3.7.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu mekanisme yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang dilakukan memakai analisis regresi data panel.

3.7.6.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima ataupun ditolak, dimana untuk ketentuan pada uji t ialah sebagai berikut (Mahulete, 2016).

H_0 : Berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

H_1 : Berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

3.7.6.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Berarti variabel bebas tidak memiliki pengaruh dengan variabel terikat

H_1 : Berarti ada pengaruh secara serentak antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.7.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menunjukkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen pada menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen.

Dalam realitas nilai *adjusted* R^2 bisa negatif, meski yang dikehendaki wajib bernilai positif. Menurut Ghozali (2016), jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika $R^2 = 1$, maka *adjusted* $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1-k)/(n-k)$. jika $k > I$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai negatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan lima variabel independen antara lain ukuran perusahaan (X1), tingkat utang (X2), profitabilitas (X3), intensitas aset tetap (X4) dan intensitas persediaan (X5). Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan manajemen pajak (Y). Unit analisis dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisis nya berdasarkan informasi dari divisi organisasi/perusahaan pada suatu sektor tertentu, yaitu Bursa Efek Indonesia dan IDNFinancials. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pengambilan data pada website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu (www.idx.co.id) dan IDNFinancials (www.idnfinancials.com) , serta website masing-masing perusahaan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini memakai sampel data sekunder yang diperoleh dari Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Metode penarikan sampel yang dipakai pada penelitian ini merupakan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria – kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria sampel dibutuhkan untuk menghindari munculnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil analisis. Terdapat 53 perusahaan yang berada dalam perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 23 perusahaan, namun terdapat data yang mengalami nilai yang terlalu ekstrim (outlier) yaitu sebanyak 7 perusahaan, sehingga diperoleh sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu sebanyak 16 perusahaan.

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar berturut – turut di BEI selama periode penelitian tahun 2016-2020.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian tahun 2016-2020.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak mengalami rugi sebelum pajak selama periode penelitian 2016-2020.

4. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya.
5. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki nilai terlalu ekstrim (outlier)

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

NO	KRITERIA	JUMLAH
	Jumlah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	53
1	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak terdaftar berturut – turut di BEI selama periode penelitian tahun 2016-2020.	(17)
2	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian tahun 2016-2020.	(1)
3	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang mengalami rugi sebelum pajak selama periode penelitian 2016-2020.	(12)
4	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya.	(0)
5	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki nilai terlalu ekstrim (outlier)	(7)
Jumlah Sampel Penelitian		16
Jumlah Tahun Observasi		5
Jumlah Data Penelitian		80

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021).

Setelah melakukan seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan yang memiliki kriteria sampel. Dengan tahun pengamatan 5 tahun berturut-turut, maka total sampel menjadi 80 sampel, yaitu 16 x 5 tahun observasi, dengan pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling.

Tabel 4.2 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal Listing di BEI
1.	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	13 Juni 1994
2.	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	09 Juli 1996
3.	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk.	27 Februari 1984
4.	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	11 November 1994
5.	HMSP	PT H.M. Sampoerna Tbk.	15 Agustus 1990
6.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	07 Oktober 2010
7.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	14 Juli 1994
8.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	30 Juli 1991
9.	MYOR	PT Mayora Indah Tbk.	04 Juli 1990

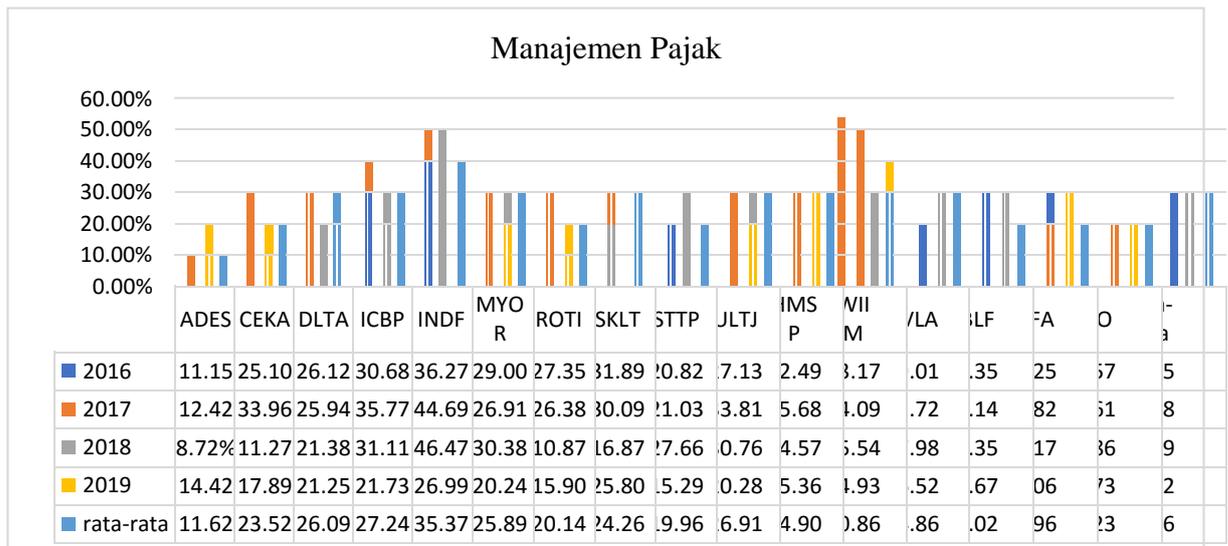
No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal Listing di BEI
10.	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	16 Oktober 2001
11.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.	28 Juni 2010
12.	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido	18 Desember 2013
13.	SKLT	PT Sekar Laut Tbk.	08 September 1993
14.	STTP	PT Siantar Top Tbk.	16 Desember 1996
15.	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk	02 Juli 1990
16.	WIIM	PT Wisnilak Inti Makmur Tbk.	18 Desember 2012

(Sumber: www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com diolah oleh penulis, 2022)

4.2 Kondisi Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

4.2.1 Kondisi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan se-efisien mungkin untuk mampu menerima laba yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang bisa menyebabkan sanksi perpajakan. Manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak dapat diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Berikut data manajemen pajak manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



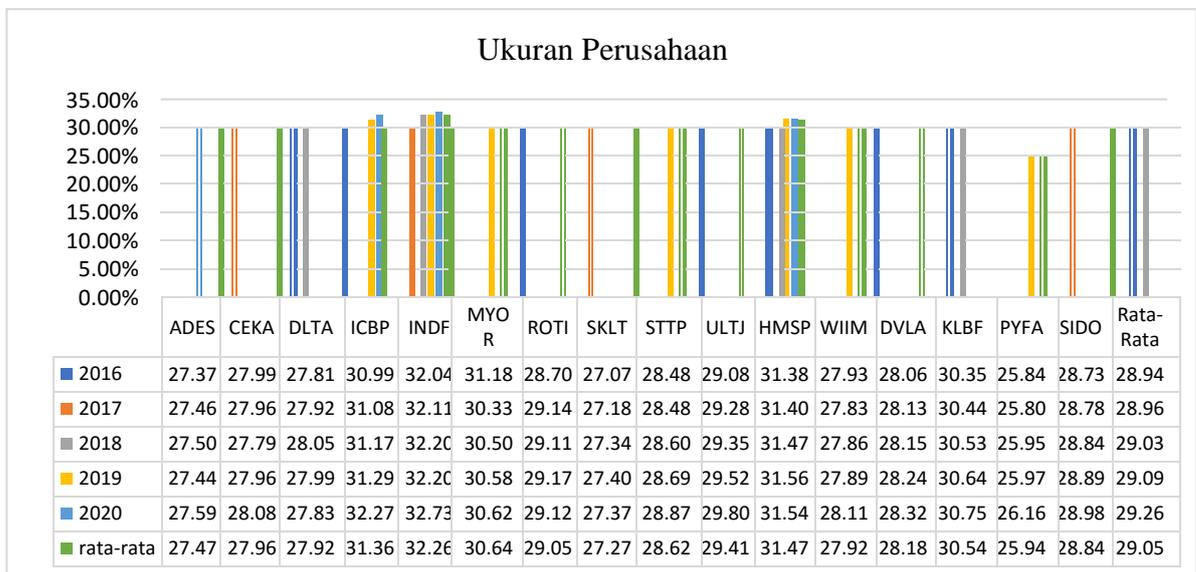
(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.1 Gambar Dan Tabel Data Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

Menurut Newberry dan Gupta (1997), CETR dikelompokkan menjadi tiga, yaitu CETR rendah yang bernilai < 10%, CETR normal antara 10% sampai batas atas STR (*Statutory Tax Rate*) dan CETR tinggi atau *high* diatas STR yaitu lebih dari 25%. Semakin tinggi nilai CETR diatas STR yaitu lebih dari 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya apabila semakin rendah nilai CETR dibawah STR kurang dari 25% mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Nilai rata-rata manajemen pajak perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi termasuk ke dalam kelompok CETR normal karena bernilai antara 10% sampai batas atas STR (*Statutory Tax Rate*). Nilai rata-rata seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebesar 0,2436 atau 24,36%. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa CETR < 25% artinya semakin tinggi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

4.2.2 Kondisi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Ukuran perusahaan adalah salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: Total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat sebagai salah satu cara untuk menerima insentif pajak. Penelitian ini menggunakan Ln (total aset) perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. Berikut data ukuran perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

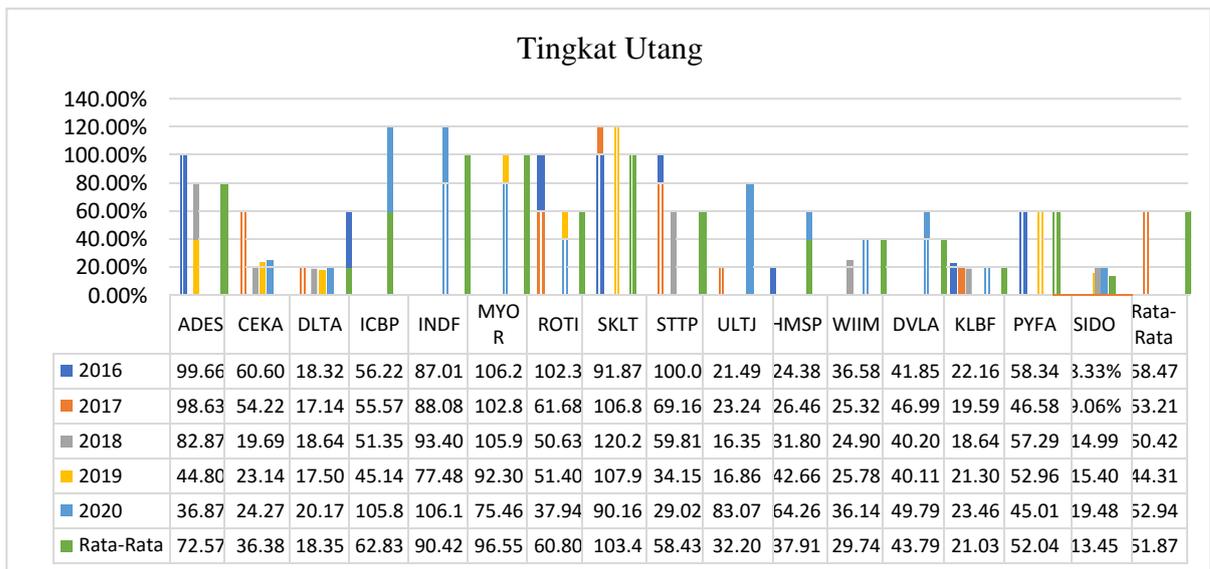
Gambar 4.2 Gambar Dan Tabel Data Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.2 di atas menunjukkan nilai rata-rata ukuran perusahaan periode 2016-2020 yaitu sebesar 0,29,05 atau 29,05%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki jumlah aset yang

besar sehingga termasuk dalam perusahaan skala besar. Perusahaan skala besar mempunyai kekayaan bersih Rp10.000.000.000, (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan Rp50.000.000.000. Perusahaan yang memiliki aset yang besar juga dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan, karena perusahaan yang memiliki prospek baik dapat di lihat dari kepemilikan aset suatu perusahaan.

4.2.3 Kondisi Tingkat Utang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Tingkat utang merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Tingkat utang merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang dan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Dengan adanya utang perusahaan akan lebih memilih memakai utang dalam pembiayaan. Penelitian ini menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER). Berikut data tingkat utang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

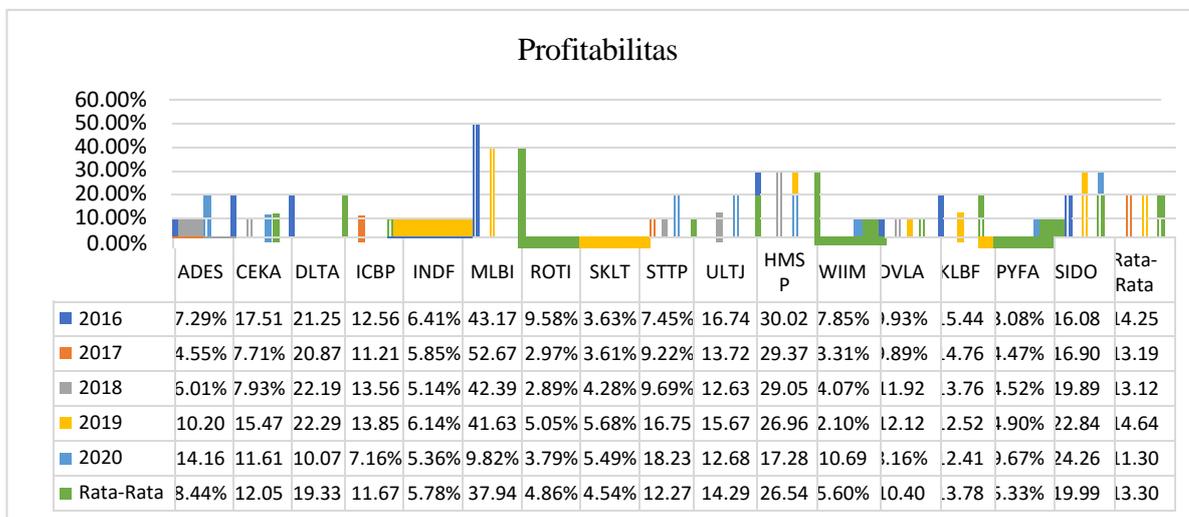
Gambar 4.3 Gambar Dan Tabel Data Tingkat Utang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunjukkan nilai rata-rata tingkat utang periode 2016-2020 yaitu sebesar 0,5187 atau 51,87%. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. Pada pasal 2 ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1) antara utang dan modal. Dalam nilai rata-rata perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020 menunjukkan persentase 51,87% yang artinya perusahaan melewati batas wajar maka perusahaan dikategorikan memanfaatkan utang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membiayai operasionalnya menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang yang akan

mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang wajib dibayarkan sangat besar sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan pembiayaan dengan utang secara besar-besaran.

4.2.4 Kondisi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Berikut data profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

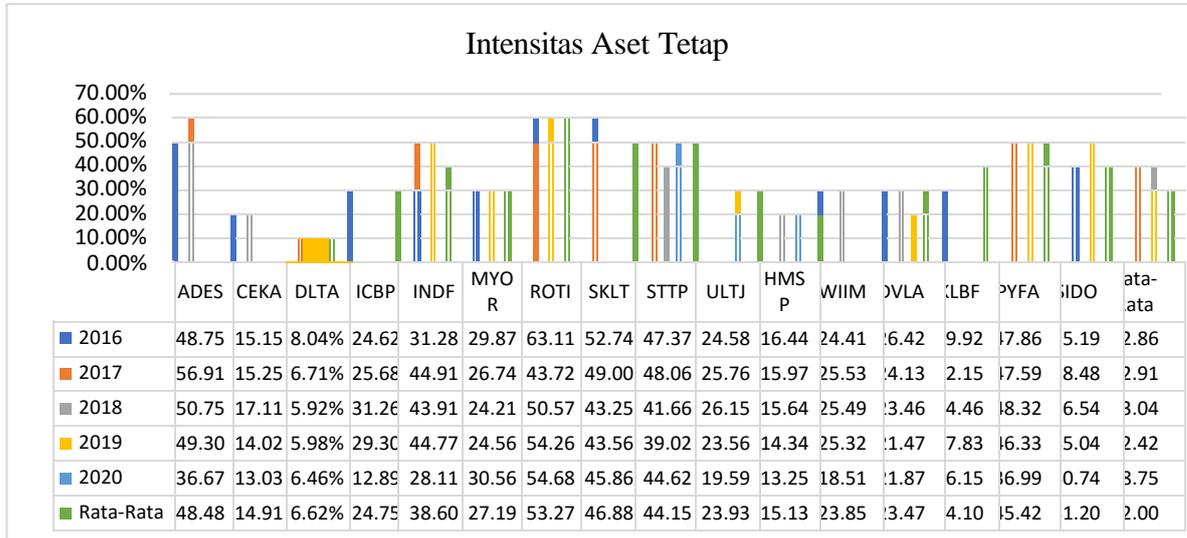
Gambar 4.4 Gambar Dan Tabel Data Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.4 di atas menunjukkan nilai rata-rata profitabilitas periode 2016-2020 yaitu sebesar 0,13,30 atau 13,30%. Ditinjau dari nilai standar ROA yang baik yaitu harus di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dalam keadaan baik karena diatas 5% yaitu sebesar 13,30%. Artinya, perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya (total aset) yang dimiliki menjadi laba bersih. Perusahaan memanfaatkan aset nya dengan efektif dan efisien baik berupa modal sendiri maupun modal pinjaman, sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang di harapkan.

4.2.5 Kondisi Intensitas Aset Tetap Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Intensitas aset tetap merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Intensitas aset tetap yaitu gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki

perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini bisa dihitung memakai cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan menggunakan total aset perusahaan. Berikut data intensitas aset tetap pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



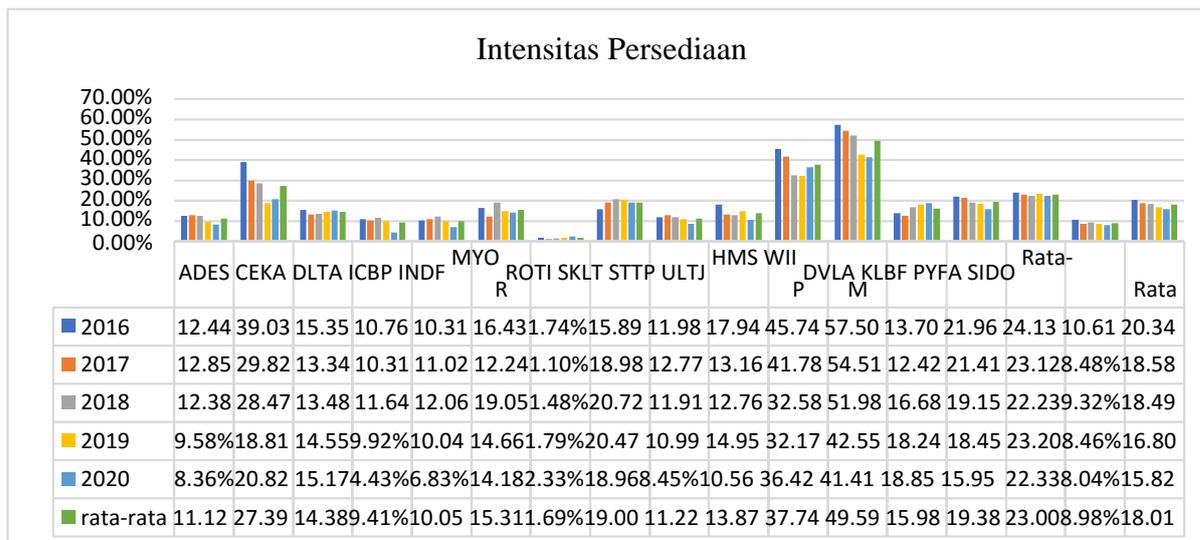
(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.5 Gambar Dan Tabel Data Intensitas Aset Tetap Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.5 di atas menunjukkan nilai rata-rata intensitas aset tetap periode 2016-2020 yaitu sebesar 0,3200 atau 32,00%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang tinggi untuk membiayai kepentingan internal perusahaan yaitu kegiatan operasional perusahaan.

4.2.6 Kondisi Intensitas Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Intensitas persediaan merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Intensitas persediaan adalah bagian dari capital Intensity Ratio yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Rasio intensitas persediaan bisa dihitung menggunakan cara nilai persediaan yang terdapat pada perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Berikut data intensitas aset persediaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.6 Gambar Dan Tabel Data Intensitas Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.6 di atas menunjukkan nilai rata-rata intensitas persediaan periode 2016-2020 yaitu sebesar 0,18,01 atau 18,01%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki hasil persentase di bawah 100%, maka perputaran persediaan bisa dikatakan ideal atau sesuai dengan kebutuhan bukan merupakan sebuah pemborosan. Semakin tinggi perputaran persediaan, semakin baik. Hal tersebut dikarenakan perputaran persediaan tinggi menampakkan bahwa suatu perusahaan mampu menjual barang dengan sangat cepat dan memang terdapat permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

4.3 Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (X1), tingkat utang (X2), profitabilitas (X3), intensitas aset tetap (X4) dan intensitas persediaan (X5) sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen pajak (Y). Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga membuahkan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range. Berikut data hasil pengolahan uji statistik deskriptif pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0,243643	0,290412	0,518712	0,115917	0,320214	0,180082
Median	0,246184	0,287140	0,450709	0,106470	0,302384	0,146034
Maximum	0,540884	0,327256	1,202873	0,300229	0,631147	0,574974
Minimum	0,065587	0,257957	0,083299	0,021029	0,059199	0,011024
Std. Dev.	0,082067	0,017118	0,315154	0,067420	0,142069	0,120305
Skewness	0,669335	0,309405	0,547251	0,875076	0,000639	1,455157
Kurtosis	4,675303	2,290908	1,990665	3,287837	2,004687	4,923520
Jarque-Bera	15,32893	2,952457	7,388968	10,48629	3,302164	40,56620
Probability	0,000469	0,228498	0,024860	0,005284	0,191842	0,000000
Sum	19,49146	23,23299	41,49696	9,273391	25,61709	14,40652
Sum Sq. Dev.	0,532065	0,023148	7,846436	0,359092	1,594498	1,143384
Observation	80	80	80	80	80	80

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan table 4.3 diatas mengenai hasil uji statistik deskriptif selama 5 periode (2016-2020) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang berjumlah 16 sampel, maka $N = 80$. Dapat diketahui bahwa nilai manajemen pajak sebagai variabel dependen (Y) yang diukur menggunakan rasio pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Tax Rate*) adalah antara 0,065587 sampai dengan 0,540884. Nilai rata-rata (mean) sebanyak 0,243643 atau 24,36% yang berarti secara rata-rata manajemen pajak perusahaan baik, karena rata-rata manajemen pajak (tarif pajak efektif) perusahaan yang dijadikan sampel penelitian berada di bawah tarif yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 25%. Sedangkan nilai standar deviasi dari hasil pengujian sebesar 0,082067. Nilai ukuran perusahaan (X1) yang diukur menggunakan rasio Ln (total aset) adalah antara 0,257957 sampai dengan 0,327256. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,290412 dan nilai standar deviasi dari hasil pengujian sebesar 0,017118. Nilai tingkat utang (X2) yang diukur menggunakan rasio total utang dengan total ekuitas (*Debt Equity Ratio*) adalah antara 0,083299 sampai dengan 1,202873. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,518712 dan nilai standar deviasi dari hasil pengujian sebesar 0,315154. Nilai profitabilitas (X3) yang diukur menggunakan rasio laba bersih setelah pajak dengan dengan total aset (*Return On Asset*) adalah antara 0,021029 sampai dengan 0,300229. Nilai rata-rata (mean) sebesar

0,115917 dan nilai standar deviasi dari hasil pengujian sebesar 0,067420. Nilai Intensitas aset tetap (X4) yang diukur menggunakan rasio total aset tetap dengan total aset adalah antara 0,059199 sampai dengan 0,6311470. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,320214 dan nilai standar deviasi dari hasil pengujian sebesar 0,142069. Nilai Intensitas persediaan (X5) yang diukur menggunakan rasio total persediaan dengan total aset adalah antara 0,011024 sampai dengan 0,574974. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,180082 dan nilai standar deviasi dari hasil pengujian sebesar 0,120305.

4.4 Analisis Data

Dalam menguji pengaruh ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pengolahan dan perhitungan data sekunder untuk variabel bebas akan diolah dan dihitung dengan menggunakan *Microsoft Office Excel 2019*. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang baik maka perlu dilakukan beberapa uji asumsi klasik dengan menggunakan *views 10*. Regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan data gabungan antara deret waktu (*time series*) serta data deret lintang (*cross section*). Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu Manajemen Pajak. Sementara variabel independen yaitu ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

4.4.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Common Effect*

H_1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross-section Chi-Square* $< \alpha = 0.05$, atau *probability (p-value) F Test* $< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan ialah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross-section Chi-Square* $> \alpha = 0.05$, atau *probability (p-value) F Test* $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan menolak H_1 atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan ialah metode *common effect*.

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Redudant Fixed Effects Tests			
Equation: MODEL_FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	3,283044	(15,59)	0,0005
Cross-section Chi-square	48,549270	15	0,0000

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas mengenai hasil uji chow, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas cross-section F = 0,0005 yang brarti nilai probabilitas $< \alpha = 0,05$, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah H_0 ditolak dan menerima H_1 atau dapat dikatakan bahwa metode yang paling tepat digunakan adalah metode *fixed effect* dibandingkan dengan metode *common effect* untuk mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Setelah melakukan uji chow diatas dan memperoleh kesimpulan bahwa metode *fixed effect* yang lebih tepat digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hausman. Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Random Effect*

H_1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross-section random* $< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 atau metode yang digunakan ialah metode *fixed effect*. Tetapi, jika nilai *p-value cross-section random* $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan menolak H_1 atau metode yang digunakan ialah metode *random effect*.

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Equation: MODEL_REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. df	Prob.
Cross-section random	5,425261	5	0,3662

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas mengenai hasil uji hausman, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas cross-section random = 0,3662 yang brarti nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah H_0 diterima dan menolak H_1 atau dapat dikatakan bahwa metode yang paling tepat digunakan adalah metode *random effect* dibandingkan dengan metode *fixed effect* untuk mengestimasi data panel.

3. Uji Langrange Multiplier

Setelah melakukan uji hausman diatas dan memperoleh kesimpulan bahwa metode *random effect* yang lebih tepat digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji langrange multiplier. Uji *Langrange Multiplier* digunakan untuk memilih model *random effect* atau model *common effect* yang sebaiknya digunakan. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji *langrange multiplier* ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Metode *Common Effect*

H_1 : Metode *Random Effect*

Jika nilai *Breusch-Pagan both* $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 atau metode yang tepat untuk regresi data panel ialah *random effect*. Jika nilai *Breusch-Pagan both* $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan menolah H_1 , atau metode yang tepat untuk regresi data panel ialah metode *common effect*.

Tabel 4.6 Hasil Uji Langrange Multiplier

Langrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis time	Both
Breusch-Pagan	0,114937	8,164255	8,279192
	(0,7346)	(0,0043)	(0,0040)

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas mengenai hasil langrange multiplier, dapat dilihat bahwa nilai Breusch-Pagan both = 0,0040 yang brarti nilai Breusch-Pagan both $< \alpha = 0,05$, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah H_0 ditolak dan menerima H_1 atau dapat dikatakan bahwa metode yang paling tepat adalah metode *random effect* dibandingkan dengan metode *common effects* untuk mengestimasi data panel.

Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman dan uji langrange multiplier yang telah diolah. Maka dapat disimpulkan metode estimasi regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Kesimpulan Pengujian Pemilihan Model

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	<i>Common Effect vs Fixed Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>
2	Uji Hausman	<i>Random Effects vs Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>
3	Uji Langrange Multiplier	<i>Random Effect vs Common Effect</i>	<i>Random effect</i>

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Hasil uji pemilihan model regresi data panel untuk ketiga model data panel diatas bertujuan untuk memperkuat kesimpulan metode estimasi regresi data panel yang digunakan. Berdasarkan tabel 4.7 diatas tentang hasil kesimpulan pengujian pemilihan model bisa menarik kesimpulan bahwa model regresi data panel yang dipakai adalah *Random Effect Model* (REM) untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

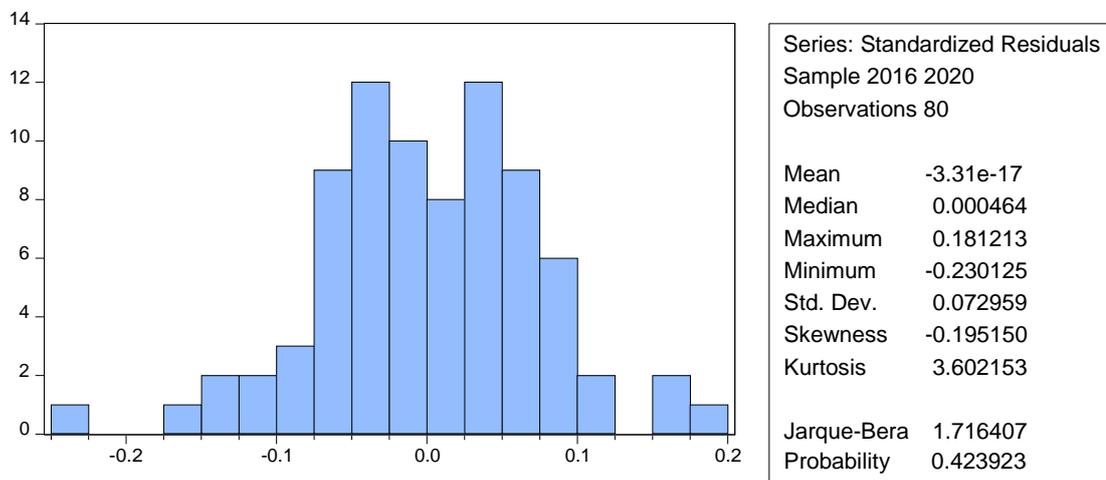
4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ialah uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi ketentuan untuk dianalisis lebih lanjut (Sugiyono, 2013). Untuk

melakukan Uji Asumsi Klasik atas Data Sekunder ini, penelitian melakukan uji Normalitas Data, Multikolineritas, Heteroskedesitas, dan Autokorelelasi.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi normal. Uji Normalitas Data bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel dependen juga independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data pada penelitian ini dilakukan menggunakan rumus *Kolmogrov-smirnov* (KS) menggunakan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$. Jika $\text{sig} > \alpha$ berarti residual terdistribusi normal. Apabila $\text{sig} < \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal. Berikut data hasil uji normalitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar grafik 4.7 terlihat bahwa uji normalitas memiliki nilai probabilitas 0,423923 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 yaitu $0,423923 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga asumsi klasik tentang kenormalan di *random effects* terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolienaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang wajib terpenuhi dalam model regresi adalah tidak terdapatnya multikolineritas. Untuk mendeteksi adanya multikolineritas yaitu, jika antara variabel ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,90 maka hal ini merupakan adanya indikasi multikolineritas. Berikut data hasil uji multikolineritas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1,000000	0,117804	0,295863	-0,227122	-0,140049
X2	0,117804	1,000000	-0,531468	0,381340	-0,224314
X3	0,295863	-0,531468	1,000000	-0,502912	0,111150
X4	-0,227122	0,381340	-0,502912	1,000000	-0,400850
X5	-0,140049	-0,224314	0,111150	-0,400850	1,000000

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan grafik 4.8 terlihat bahwa uji multikolinieritas diketahui bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, inyensitas aset tetap dan intensitas persediaan bebas dari uji multikolinieritas karena memiliki nilai korelasi dibawah 0,90 atau tidak ada nilai yang lebih dari 0,90. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dan data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *white* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat nilai probabilitasnya. Apabila nilai prob. $> \alpha = 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut data hasil uji hetereskedastisitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,414488	4,828707	-0,085838	0,9319
X2	-0,073224	0,162509	-0,450584	0,6539
X3	-0,286098	0,862994	-0,331517	0,7414
X4	0,060404	0,350081	0,172544	0,8636
X5	0,503608	0,397358	1,267391	0,2100
C	0,044621	0,736776	0,060562	0,9519

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan grafik 4.9 terlihat bahwa uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai prob. dari variabel independen ukuran perusahaan sebagai (X1) memiliki hasil lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu 0,9319, tingkat utang sebagai (X2) memiliki hasil lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu 0,6539, profitabilitas sebagai (X3) memiliki hasil lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu 0,7414, intensitas aset tetap sebagai (X4) memiliki hasil lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu 0,8636, intensitas persediaan sebagai (X5) memiliki hasil lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu 0,2100. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi manajemen pajak berdasarkan variabel-variabel yang memengaruhinya.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan guna melihat keadaan adanya hubungan antara residual satu penelitian dengan penelitian lainnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadinya masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji durbin-watson. Apabila nilai $dU < DW < (4 - dU)$ maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Berikut data hasil uji autokorelasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0,044805	Mean dependent var	8,19E-17
Adjusted R-squared	-0,048061	S.D. dependent var	0,072256
S.E. of regression	0,073971	Akaike info criterion	-2,275635
Sum squared resid	0,393968	Schwarz criterion	-2,037432
Log likelihood	99,02539	Hannan-Quinn criter.	-2,180133
F-statistic	0,482472	Durbin-Watson stat	2,044915
Prob(F-statistic)	0,844302		

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan grafik 4.10 terlihat bahwa uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,044915. Nilai dU yang dapat dilihat dari tabel DW dengan $K = 5$ yang menunjukkan variabel independen dan $n = 80$ yang menunjukkan observasi. Nilai dU adalah 1,7716. Nilai $4-dU$ adalah 2,2284 ($4 - 1,7716$). Dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,044915 nilai tersebut terletak di antara nilai dU dan $(4-dU)$. $dU < DW < (4-dU)$ ($1,7716 < 2,044915 < 2,2284$), maka dapat dikatakan bahwa data memenuhi asumsi bahwa tidak memiliki autokorelasi.

4.6 Analisis Regresi data Panel

Model regresi data panel adalah model analisis yang memakai data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross-section*). Analisis regresi data panel bertujuan guna menguji seberapa berpengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak sebagai variabel dependen dengan beberapa perusahaan sebagai sampel dalam beberapa kurun waktu. Berikut data hasil uji regresi data panel *Random Effect Model (REM)* yang digunakan untuk menganalisis Uji t, Uji F dan Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,231433	0,195506	-1,183767	0,2403
X1	1,724010	0,654433	2,634356	0,0103
X2	-0,027272	0,034459	-0,791417	0,4312
X3	-0,458344	0,174359	-2,628735	0,0104
X4	-0,010015	0,082813	-0,120939	0,9041
X5	0,249254	0,088237	2,824824	0,0061

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Formulasi persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = (-0,231433) + 1,724010 X_{1it} + (-0,027272) X_{2it} + (-0,458344) X_{3it} + (-0,010015) X_{4it} + 0,249254 X_{5it} + \mu_{it}$$

Di mana:

Y_{it} = Variabel Manajemen Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi untuk Ukuran Perusahaan

X_1 = Variabel Ukuran Perusahaan

β_2	= Koefisien Regresi untuk Tingkat Utang
X2	= Variabel Tingkat Utang
β_3	= Koefisien Regresi untuk Profitabilitas
X3	= Variabel Profitabilitas
β_4	= Koefisien Regresi untuk Intensitas Aset Tetap
X4	= Variabel Intensitas Aset Tetap
β_5	= Koefisien Regresi untuk Intensitas Persediaan
X5	= Variabel Intensitas Persediaan
i	= Entitas ke- i
t	= Periode ke- t
ε	= Error

Model regresi data panel di atas memiliki interpretasi sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar -0,231433 dengan nilai negatif, menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu manajemen pajak akan bernilai -0,231433 apabila variabel independen yaitu ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan bernilai nol.

2. Koefisien Regresi Variabel Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 1,724010. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya manajemen pajak sebesar 1,724010 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi nilainya tetap.

3. Koefisien Regresi Variabel Tingkat Utang

Variabel tingkat utang (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,027272. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap peningkatan DER sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan menurunnya manajemen pajak sebesar -0,027272 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi nilainya tetap.

4. Koefisien Regresi Variabel Profitabilitas

Variabel profitabilitas (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0,458344. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap peningkatan ROA sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan menurunnya manajemen pajak sebesar -

0,458344 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi nilainya tetap.

5. Koefisien Regresi Variabel Intensitas Aset Tetap

Variabel intensitas aset tetap (X4) memiliki koefisien regresi sebesar -0,010015. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap peningkatan intensitas aset tetap sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan menurunnya manajemen pajak sebesar -0,010015 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi nilainya tetap.

6. Koefisien Regresi Variabel Intensitas Persediaan

Variabel intensitas persediaan (X5) memiliki koefisien regresi sebesar 0,249254. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap peningkatan intensitas persediaan sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya manajemen pajak sebesar 0,249254 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi nilainya tetap.

4.7 Uji Hipotesis

1. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Uji t bertujuan untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji t statistik pada dasarnya menampilkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelasan secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat dengan menggunakan Software Statistic Eviews 10. Berikut disajikan hasil uji hasil uji t menggunakan Eviews 10 dengan *Random Effect Model* (REM) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,231433	0,195506	-1,183767	0,2403
X1	1,724010	0,654433	2,634356	0,0103
X2	-0,027272	0,034459	-0,791417	0,4312
X3	-0,458344	0,174359	-2,628735	0,0104
X4	-0,010015	0,082813	-0,120939	0,9041
X5	0,249254	0,088237	2,824824	0,0061

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji t di atas yang menggunakan *Random Effect Model* (REM), berikut adalah interpretasi atas hasil uji t:

a. Variabel ukuran perusahaan (X1) terhadap manajemen pajak (Y)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tabel 4.18 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0103 yang artinya nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,0103 < \alpha = 0,05$, dengan nilai t-statistic = 2,634356. Maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen pajak.

b. Variabel tingkat utang (X2) terhadap manajemen pajak (Y)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tabel 4.18 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,4312 yang artinya nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $0,4312 > \alpha = 0,05$, dengan nilai t-statistic = -0,791417. Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Utang secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak.

c. Variabel profitabilitas (X3) terhadap manajemen pajak (Y)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tabel 4.18 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0104 yang artinya nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,0104 < \alpha = 0,05$, dengan nilai t-statistic = -2,628735. Maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak.

d. Variabel intensitas aset tetap (X4) terhadap manajemen pajak (Y)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tabel 4.18 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,9041 yang artinya nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $0,9041 > \alpha = 0,05$, dengan nilai t-statistic = -0,120939. Maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas Aset Tetap secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak.

e. Variabel intensitas persediaan (X5) terhadap manajemen pajak (Y)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tabel 4.18 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0061 yang artinya nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,0061 < \alpha = 0,05$, dengan nilai t-statistic = 2,824824. Maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas Persediaan secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen pajak.

2. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Seluruh variabel independen dapat dikatakan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai probabilitas $< \alpha = 0,05$. Berikut disajikan hasil uji statistik F menggunakan EViews 10 dengan *Random Effect Model* (REM) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.13 Hasil Uji F

Weighted Statistics			
R-squared	0,161466	Mean dependent var	0,169931
Adjusted R-squared	0,104808	S.D. dependent var	0,073807
S.E. of regression	0,069832	Sum squared resid	0,360867
F-statistic	2,849843	Durbin-Watson stat	1,651910
Prob(F-statistic)	0,020811		

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13 hasil uji F diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,020811 yang artinya nilai probabilitas lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$ atau $0,020811 < \alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak.

3. Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen pada menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi menggunakan EViews 10 dengan *Random Effect Model* (REM) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi

Cross-section dixed (dummy variables)			
R-squared	0,161466	Mean dependent var	0,169931
Adjusted R-squared	0,104808	S.D. dependent var	0,073807
S.E. of regression	0,069832	Sum squared resid	0,360867
F-statistic	2,849843	Durbin-Watson stat	1,651910
Prob(F-statistic)	0,020811		

(Sumber: Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10 diolah oleh penulis, 2022)

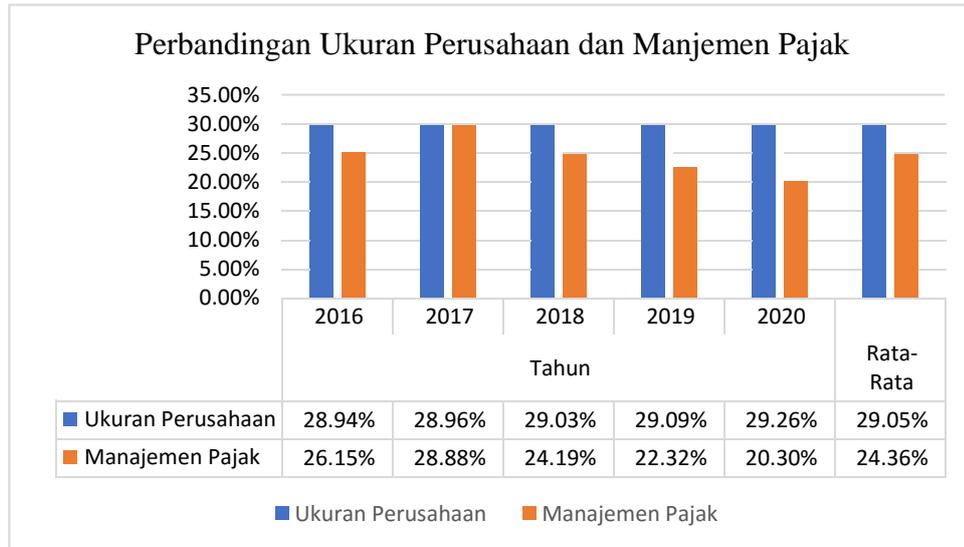
Berdasarkan hasil pada tabel 4.14 hasil uji F diatas yang menggunakan *Random Effect Model* (REM) dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,161466 atau 16,15% menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan, sedangkan sisanya sebesar 83,85% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 23 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dengan menggunakan alat bantu EViews 10 maka penulis menginterpretasikan hasil yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

4.8.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan Ln (Total Aset) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yang dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai sig $0,0103 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berikut disajikan ringkasan data perbandingan ukuran perusahaan dan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.8 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Ukuran Perusahaan dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah nilai beban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan. Dapat dilihat pada gambar 4.8 nilai ukuran perusahaan pada tahun 2016 sebesar 28,94% mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 28,96%, sedangkan dilihat dari manajemen pajak pada tahun 2016 sebesar 26,15% mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 28,88%. Ini membuktikan bahwa hasil tidak sesuai dengan teori.

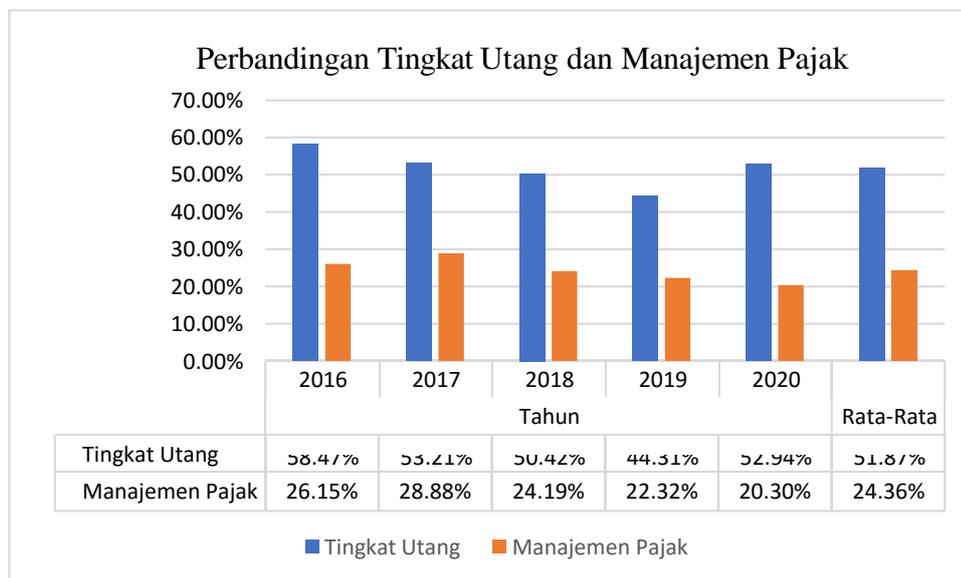
Hasil penelitian menunjukkan kearah positif yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Artinya perusahaan tidak menggunakan asset untuk melakukan manajemen pajak saja tetapi juga untuk kegiatan operasional perusahaan. Fenomena penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tindakan penghindaran pajak, namun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara (Rusydi, 2013). Dalam UU RI No.20 Tahun 2008 perusahaan yang termasuk ke skala besar yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp10.000.000.000, (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan Rp50.000.000.000. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki jumlah aset yang besar sehingga termasuk dalam perusahaan skala besar dan dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan, karena perusahaan yang memiliki prospek baik dapat di lihat dari kepemilikan aset suatu perusahaan. Perusahaan yang termasuk ke pada skala besar cenderung mempunyai sumber daya melimpah yang dapat dikelola supaya dapat digunakan untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Sehingga bisa menekan tarif pajak efektif (Putri, 2017). Hal ini menandakan bahwa peran ukuran perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak dapat

berfungsi secara efektif dan efisien. Selain itu, banyaknya kegiatan operasional perusahaan mengakibatkan terdapatnya celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Jadi, ukuran perusahaan merupakan prioritas perusahaan ketika melakukan manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak dan penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2017) dan Azura (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

4.8.2 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat utang yang dihitung menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak yang dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai sig $0,4312 > \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berikut disajikan ringkasan data perbandingan tingkat utang dan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.9 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Tingkat Utang dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Semakin tinggi jumlah utang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi nilai beban pajak yang wajib di bayar oleh perusahaan. Dapat dilihat pada gambar 4.9 nilai tingkat utang pada tahun 2019 sebesar 44,31% mengalami kenaikan sebesar 52,94% pada tahun 2020, sedangkan manajemen pajak pada tahun 2019 sebesar 22,32% mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 20,30%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan tidak dapat memengaruhi terjadinya penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penghindaran pajak berbanding lurus dengan *effective tax rate*.

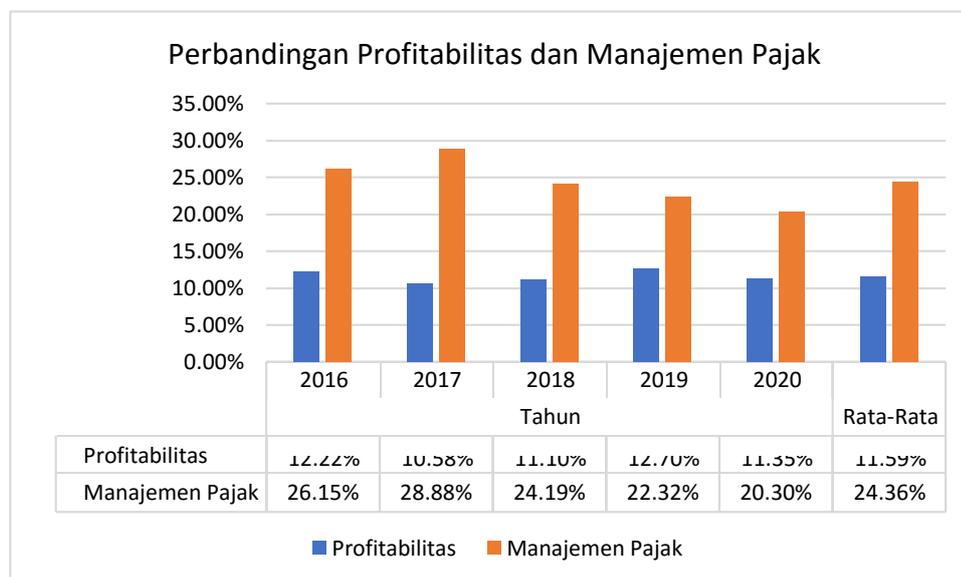
Hal ini di sebabkan karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tidak menjadikan adanya beban bunga dalam utang untuk tujuan penghindaran pajak. Namun utang tersebut muncul untuk tujuan lain yaitu untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang wajib dibayarkan sangat besar sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan pembiayaan dengan utang secara besar-besaran. Perusahaan yang dijadikan sampel memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham, sehingga beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat dipakai menjadi pengurang laba kena pajak perusahaan merupakan beban bunga yang timbul akibat adanya pinjaman pada pihak ketiga/kreditur yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan.

Meskipun dengan pendanaan melalui utang dapat menghindari beban pajak yang tinggi, perusahaan tentu tidak ingin bahwa aset yang mereka miliki dibiayai melalui utang. Utang yang terlalu besar membahayakan posisi keuangan perusahaan dan juga mengurangi kepercayaan investor. Perusahaan lebih memilih untuk tidak terlalu tergantung pada utang untuk mendapatkan kepercayaan investor. Dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa utang perusahaan belum bisa dijadikan sebagai determinan dari manajemen pajak perusahaan, banyak atau rendahnya utang perusahaan tidak memotivasi manajer untuk menggunakan beban bunganya dalam menentukan tarif pajak efektifya. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tingkat utang perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak belum dapat berfungsi secara efisien. Jadi, utang bukan menjadi prioritas perusahaan ketika melakukan manajemen pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Yunia (2020) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2017) dan Rahmawati dkk (2020) yang menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

4.8.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang dihitung menggunakan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai $\text{sig } 0,0104 < \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Berikut disajikan ringkasan data perbandingan profitabilitas dan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.10 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Profitabilitas dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Semakin tinggi nilai profitabilitas maka akan semakin tinggi nilai beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dapat dilihat pada gambar 4.10 nilai profitabilitas pada tahun 2018 sebesar 11,10% mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 12,27%, sedangkan manajemen pajak pada tahun 2018 sebesar 24,19% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 22,32%. Ini membuktikan bahwa hasil tidak sesuai dengan teori.

Hasil penelitian menunjukkan kearah negatif yang artinya semakin besar profitabilitas maka akan semakin kecil beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Artinya perusahaan menggunakan asset bukan hanya untuk melakukan manajemen pajak tetapi juga untuk kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang menerima penghasilan ataupun memperoleh laba dari aktivitas usahanya di haruskan

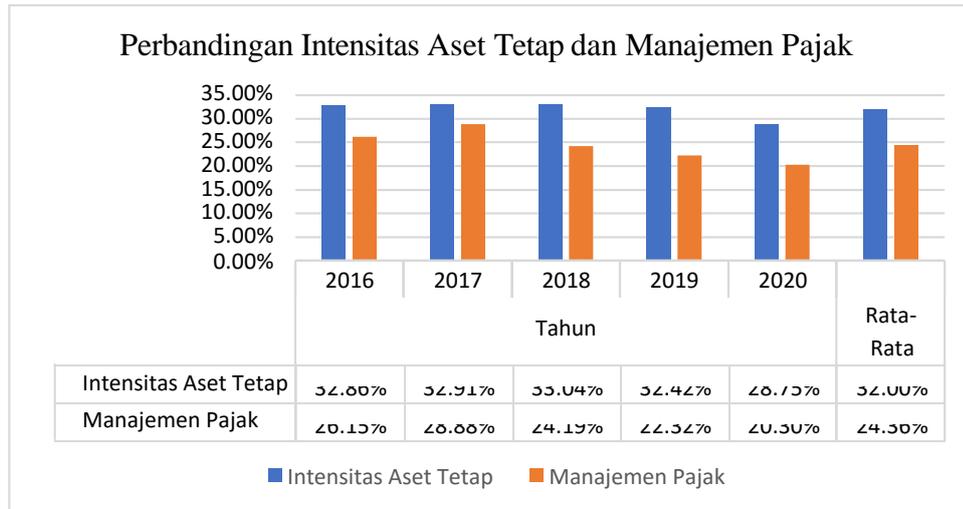
untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Ketentuan terbaru dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki jumlah aset yang tinggi maka akan semakin tinggi beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang tinggi diatas 5% sehingga memiliki kesempatan dalam memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak dan dapat mengurangi beban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan, karena perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya (total aset) yang dimiliki menjadi laba bersih. Artinya, perusahaan memanfaatkan asset nya dengan efektif dan efisien baik berupa modal sendiri maupun modal pinjaman, sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang di harapkan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar cenderung menginginkan pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang wajib di bayarkan oleh perusahaan. Darmawan (2014) menyatakan bahwa pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan manajemen pajak dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa peran profitabilitas perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak dapat berfungsi secara efisien. Jadi, profitabilitas merupakan prioritas perusahaan ketika melakukan manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Yunia (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dan penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Listiawati (2019) dan Rahmawati dkk (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

4.8.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap yang dihitung menggunakan total aset tetap dibagi total aset tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak yang dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai sig $0,9041 > \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berikut disajikan ringkasan data perbandingan intensitas asset tetap dan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.11 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Intensitas Aset Tetap dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

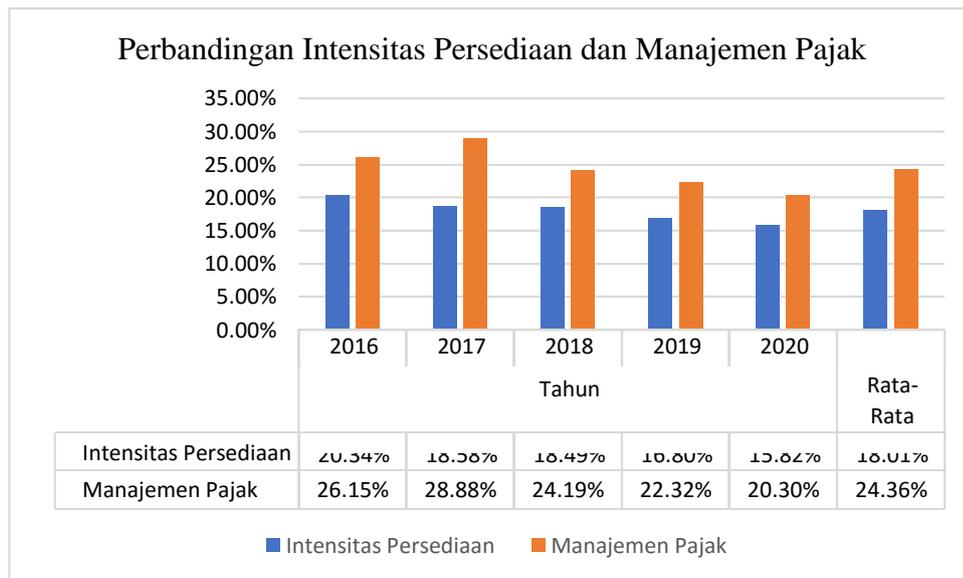
Semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka akan semakin rendah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dapat dilihat pada gambar 4.11 nilai intensitas aset tetap pada tahun 2017 sebesar 32,91% mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 33,04%, sedangkan manajemen pajak pada tahun 2017 yaitu sebesar 28,88% mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 28,88%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap perusahaan tidak dapat mempengaruhi manajemen pajak.

Hal ini di sebabkan karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan tingkat aset tetap yang tinggi menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk tujuan kegiatan operasional perusahaan bukan untuk tujuan penghindaran pajak. Dan juga ditimbulkan oleh perusahaan yang memiliki aset tetap yang telah habis manfaat ekonominya namun tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset yang bergerak yaitu kendaraan apabila dibawa pergi oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat di bebaskan melainkan hanya 50%. Adanya perlakuan untuk biaya penyusutan terhadap aset tetap dapat memengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) dalam UU PPH, penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Penghitungan dilakukan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Hal ini diartikan bahwa intensitas aset tetap tidak berdampak terhadap penentuan tarif pajak efektif atau manajemen pajak. Jadi, intensitas aset tetap bukan merupakan prioritas perusahaan ketika melakukan manajemen pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azura (2020) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

4.8.5 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intensitas persediaan yang dihitung menggunakan total persediaan dibagi total aset berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai sig $0,0061 < \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berikut disajikan ringkasan data perbandingan intensitas persediaan dan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.12 Gambar Dan Tabel Data Perbandingan Intensitas Persediaan dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Semakin tinggi intensitas persediaan perusahaan maka akan semakin rendah beban pajak yang di bayar oleh perusahaan. Dapat dilihat pada gambar 4.12 intensitas persediaan pada tahun 2016 sebesar 20,34% mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 18,58%, sedangkan manajemen pajak pada tahun 2016 yaitu sebesar 26,15% mengalami kenaikan sebesar 28,88% Ini membuktikan bahwa hasil tidak sesuai dengan teori.

Hasil penelitian menunjukkan kearah positif yang artinya semakin besar intensitas persediaan maka akan semakin besar beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Artinya perusahaan menggunakan investasi dalam persediaan bukan hanya untuk melakukan manajemen pajak tetapi juga untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6). Pada ayat ini mengatur bahwa terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*First In First Out-FIFO*) dan merata-ratakan nilai persediaan (*weighted average*).

Nilai intensitas persediaan yang tinggi akan meningkatkan laba bersih perusahaan karena biaya yang terkandung dalam persediaan mampu diefisienkan. Berdasarkan biaya tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, sehingga perusahaan membayar pajak yang lebih rendah pada saat labanya menurun. Kondisi ini seperti yang diinginkan oleh perusahaan dimana intensitas persediaan yang tinggi akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga laba pada periode berjalan dapat digantikan dengan persediaan yang dialokasikan pada periode yang akan datang. Oleh karna itu, perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memilih untuk berinvestasi dalam persediaan sebagai penerapan teori akuntansi positif dalam memilih kebijakan yang dianggap sangat menguntungkan dengan asumsi perusahaan akan memperoleh manfaat pajak yang rendah dan laba yang tinggi di masa yang akan datang. Dalam perusahaan yang dijadikan sampel memiliki nilai intensitas persediaan yang tinggi, semakin tinggi maka semakin efektif dan efisien. Semakin tinggi perputaran persediaan, semakin baik. Hal tersebut dikarenakan perputaran persediaan tinggi menampakkan bahwa suatu perusahaan mampu menjual barang dengan sangat cepat dan memang terdapat permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini diartikan bahwa intensitas persediaan berdampak terhadap penentuan tarif pajak efektif atau manajemen pajak. Jadi, intensitas persediaan merupakan prioritas perusahaan ketika melakukan manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Ahmad (2019) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2017) dan Azura (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

4.8.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara simultan menggunakan ukuran perusahaan (X1), tingkat utang (X2), profitabilitas (X3), intensitas aset tetap (X4) dan intensitas persediaan (X5) secara bersama-sama berpegaruh terhadap manajemen pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis keenam yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan secara bersama-sama berpegaruh terhadap manajemen pajak.

Ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan bertujuan untuk menekankan serendah mungkin beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan agar perusahaan yang harus membayar pajak tidak merasa terbebani dan melakukan penekanan pajak secara illegal, karena dengan adanya faktor yang memengaruhi manajemen pajak menggunakan ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan dapat digunakan sebagai faktor pengurang pajak tanpa melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan. Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil pengujian koefisien determinasi dimana R square sebesar sebesar 0,161466 atau 16,15% menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan, sedangkan sisanya sebesar 83,85% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Berikut disajikan ringkasan hasil uji hipotesis menggunakan EViews 10 dengan *Random Effect Model* (REM) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020.

Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak	H1 = ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak	Diterima
2	Pengaruh tingkat utang terhadap manajemen pajak	H2 = tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak	Tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak	Ditolak
3	Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak	H3 = profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak	Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak	Diterima
4	Pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak	H4 = intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak	Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak	Ditolak
5	Pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak	H5 = intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak	Intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak	Diterima
6	Pengaruh ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan secara bersama-sama terhadap manajemen pajak	H6 = ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak	Ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak	Diterima

(Sumber: Data diolah penulis, 2022)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 16 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan yang diproksikan menggunakan Ln (total aset) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan karena Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki jumlah aset yang tinggi sehingga termasuk dalam perusahaan skala besar. Dalam UU RI No.20 Tahun 2008 perusahaan yang termasuk ke skala besar yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp10.000.000.000, (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan Rp50.000.000.000. Nilai aset yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih efektif, efisien dan stabil dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional perusahaan. Laba tersebut mendorong tindakan pajak perusahaan karena meningkatkan jumlah beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan sehingga mendorong manajer untuk melakukan manajemen pajak.
2. Tingkat utang yang diproksikan menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap manajemen. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tidak menjadikan adanya beban bunga dalam utang untuk tujuan penghindaran pajak. Namun utang tersebut untuk tujuan membiayai kegiatan operasional perusahaan mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang wajib dibayarkan sangat besar sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan pembiayaan dengan utang secara besar-besaran. Utang yang terlalu besar membahayakan posisi keuangan perusahaan dan juga mengurangi kepercayaan investor.
3. Profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki nilai profitabilitas yang tinggi sehingga memiliki kesempatan dalam memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak dan dapat mengurangi beban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan, karena perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya (total asset) yang dimiliki menjadi laba bersih. Artinya, perusahaan memanfaatkan asset nya dengan efektif dan efisien baik berupa modal sendiri maupun modal pinjaman, sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang di harapkan. UU Harmonisasi

Peraturan Perpajakan adalah tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Perusahaan memiliki jumlah aset yang tinggi maka akan memengaruhi beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

4. Intensitas aset tetap yang diproksikan menggunakan total aset tetap perusahaan di bandingkan dengan total aset perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset yang bergerak yaitu kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan dapat di bebaskan melainkan hanya 50%.
5. Intensitas persediaan yang diproksikan menggunakan total persediaan perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memilih untuk berinvestasi dalam persediaan dianggap sangat menguntungkan dengan asumsi perusahaan akan memperoleh manfaat pajak yang rendah dan laba yang tinggi di masa yang akan datang. Menurut UU PPH 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (First In First Out-FIFO) dan merata-ratakan nilai persediaan (weighted average).
6. Ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berpengaruhnya variabel independent terhadap variabel dependen menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memanfaatkan celah praktik manajemen pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta bukti empiris bahan evaluasi terhadap kinerja perusahaan agar perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terhadap praktik manajemen pajak yang akan berdampak terhadap reputasi perusahaan sehingga akan membuat persepsi yang buruk kepada perusahaan. Selain itu, bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang netral dan adil, selain itu juga menambah pengawasan terhadap subjek pajak agar tidak terjadi kecurangan terutama dalam penetapan tarif pajak efektif perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Dari keterbatasan yang telah dipaparkan, maka rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat mengurangi keterbatasan penelitian yaitu, disarankan untuk variabel tingkat utang (X2) menggunakan rumus DAR (*Debt to Asset Ratio*), variabel *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pengganti intensitas aset tetap (X4) dan menambah variabel penelitian lain karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam praktik manajemen pajak seperti Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Fasilitas Perpajakan. Hal ini berkaitan dengan nilai R^2 yang lemah hanya bernilai 16,15%, sedangkan nilai R^2 yang kuat dapat dikatakan diatas lima puluh persen. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian di berbagai sektor seperti sektor keuangan, sektor pertambangan dan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memperluas penelitian dengan menambah periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisa, N. (2018). *Pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. [Diakses 06 Juni 2022]
- Amelia, V. (2015). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. [Diakses 28 Agustus 2021]
- Ardyansah, D & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 3, Nomor 2, Hal: 1-9. [Diakses 30 Agustus 2021]
- Ariyanti, T. (2021). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak*. Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia. [Diakses 05 April 2022]
- Aryanti, E & Gazalli, M. (2019). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, Issn (P) : 2615 - 2584, Hal: 2.10.1-2.10.5. [Diakses 04 Oktober 2021]
- Astuti, T & Aryani, A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*/Volume Xx, No. 03, Hal: 375-392. [Diakses 09 Januari 2022]
- Astriditta, dkk. (2017). Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (Jako)*. Vol 9 No 2, Hal: 142-161. [Diakses 09 Januari 2022]
- Astrinur, dkk. (2020). The Influencing Factors Of Tax Management In Go Public Companies On The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, Vol. 1, No. 1, Hal: 86-96. [Diakses 25 September 2021]
- Azura, S. (2020). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Etr) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [Diakses 23 Agustus 2021]
- Bursa Efek Indonesia [Diakses 02 Oktober 2021]
- Christina, M & Marlinah, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate Terhadap Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2016-2018. *E-Journal Trisakti School Of Management*, Hal: 1-10. [Diakses 28 Agustus 2021]

- Darmadi, I. (2013). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*. Skripsi, Universitas Diponegoro. [Diakses 28 Agustus 2021]
- Datacenter.Ortax.Org, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/Pmk.010/2015 [Diakses 22 Mei 2022]
- Damayanti, T & Gazali, M. (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Leverage, Profitability, Dan Size Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Konstruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, Hal: 2.13.1-2.13.7. [Diakses 25 September 2021]
- Efatawijaya, S & Gazali, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Issn: 1410 - 9875. Vol. 19, No. 1a*, Hal: 274-280. [Diakses 04 Januari 2022]
- Gloria, P. (2020). Effective Tax Rate Dan Faktor -Faktor Yang Memengaruhi. *Akuntansi Manajemen. Vol 9 No 2*, Hal: 17-31. [Diakses 25 September 2021]
- Hasymi & Afifah. M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal Of Accounting Science. Vol. 4, Issn 2548-3501*, Hal: 29-42. [Diakses 09 Januari 2022]
- Hati, dkk. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Equilibria Vol. 7 No. 2, 7*, Hal: 56-66. [Diakses 24 Agustus 2021]
- Idn Financials [diakses 02 Oktober 2021]
- Kurniawan, I. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel Issn Print: 0216-7743 Issn Online: 2528-1135*, Hal: 213-221. [Diakses 24 Agustus 2021]
- Nurdiana. (2020). Sah Pemerintah Pangkas Tarif Pph Badan Dari 25 Menjadi 22 Mulai 2020. *Kompas.com*. Tersedia di: [Www.Kontan.Co.Id: Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Sah-Pemerintah-Pangkas-Tarif-Pph-Badan-Dari-25-Menjadi-22-Mulai-2020](http://www.kontan.co.id) [Diakses 25 Agustus 2021]
- Putri & Evana , S. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (Roa), Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jom Fekon. Vol.3 No.1*, Hal: 1506-1519. [Diakses 28 Agustus 2021]
- Putri, Z & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Tahun 2016-2020. *Yume : Journal Of Management. Volume 4 Issue 3*, Hal: 413-420. [Diakses 09 Januari 2022]
- Mustika, dkk. (2018). Analisis Tarif Pajak Efektif Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis Vol. 11, No. 2,,* Hal: 1-8. [Diakses 02 September 2021]
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

- Rianto & Sunandar, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 3 No. 2, Hal: 44-61. [Diakses 06 Juni 2022]
- Ridlwan, A. (2016). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. [Diakses 28 Agustus 2021]
- Steven, dkk. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ekonomi* Volume 26, Nomor 2 Juni 2018, Hal: 122-137. [Diakses 24 Agustus 2021]
- Rosandi & Dwi, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. Vol. 08 No. 1, Hal: 19-35. [Diakses 06 Juni 2022]
- Sadewo. G & Sartiyah. H (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011 Sampai 2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Sains Al Qur'an*, Hal: Ii-Xxi. [Diakses 05 April 2022]
- Saham Ok [Diakses 02 Oktober 2021]
- Suandy. (2008). *Hukum Pajak* Edisi Ke dua. Jakarta: Salemba 4.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukartha, dkk. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, Dan Leverage Pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.22.3. Maret (2018): 2177-2203. Issn: 2302-8556, Hal: 2177-2203. [Diakses 25 September 2021]
- Supranto, J. (2016). *Statistik Teori & Aplikasi*. Edisi 8 Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-14/Pj.7/2003.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, Pengertian Pajak.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba 4.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba 4.
- Wijaya, A & Murtianingsing. (2021). *Determinan Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur*. Ristansi: Riset Akuntansi, Volume 2, Nomor 1, Hal: 41-58. [Diakses 25 September 2021]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Nabila Syafriti

Alamat : Griya Nugratama Blok B 2 No.2 RT/RW 01/14, Desa
Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat

Tempat dan Tanggal Lahir : Cianjur, 16 Juli 2000

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- TK : TK Aisyiyah 1 Cianjur
- SD : SD Negeri Ibu Dewi 4 Cianjur
- SMP : SMP Negeri 1 Cianjur
- SMA : SMA Negeri 1 Cianjur
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Cianjur, 05 Juli 2022

Penulis,

Hasna Nabila Syafriti

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data Manajemen Pajak					
CETR = Pembayaran Pajak / Laba Sebelum Pajak					
No	Perusahaan	Tah-un	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR (%)
Sub Sektor Makanan dan Minuman					
1.	ADES	2016	6.874.000.000	61.636.000.000	11,15
		2017	6.344.000.000	51.095.000.000	12,42
		2018	6.113.000.000	70.060.000.000	8,72
		2019	15.885.000.000	110.179.000.000	14,42
		2020	19.093.000.000	167.919.000.000	11,37
2.	CEKA	2016	71.741.157.316	285.827.837.455	25,10
		2017	48.635.458.386	143.195.939.266	33,96
		2018	13.897.283.933	123.294.812.359	11,27
		2019	51.024.771.845	285.132.249.695	17,89
		2020	68.470.778.126	232.864.791.126	29,40
3.	DLTA	2016	85.426.694.000	327.047.654.000	26,12
		2017	95.717.980.000	369.012.853.000	25,94
		2018	94.339.700.000	441.248.118.000	21,38
		2019	87.631.571.000	412.437.215.000	21,25
		2020	59.940.288.000	167.704.480.000	35,74
4.	ICBP	2016	1.530.642.000.000	4.989.254.000.000	30,68
		2017	1.862.383.000.000	5.206.561.000.000	35,77
		2018	2.005.525.000.000	6.446.785.000.000	31,11
		2019	1.615.934.000.000	7.436.972.000.000	21,73
		2020	1.684.628.000.000	9.958.647.000.000	16,92
5.	INDF	2016	2.678.358.000.000	7.385.228.000.000	36,27
		2017	3.422.799.000.000	7.658.554.000.000	44,69
		2018	3.460.973.000.000	7.446.966.000.000	46,47
		2019	2.361.672.000.000	8.749.397.000.000	26,99
		2020	2.784.615.000.000	12.426.334.000.000	22,41
6.	MLBI	2016	252.522.000.000	1.320.186.000.000	19,13
		2017	467.798.000.000	1.780.020.000.000	26,28
		2018	500.380.000.000	1.671.912.000.000	29,93
		2019	456.918.000.000	1.626.612.000.000	28,09
		2020	246.674.000.000	396.470.000.000	62,22
7.	MYOR	2016	535.275.278.217	1.845.683.269.238	29,00
		2017	588.474.260.121	2.186.884.603.474	26,91
		2018	723.570.678.622	2.381.942.198.855	30,38
		2019	547.269.067.440	2.704.466.581.011	20,24
		2020	614.758.865.448	2.683.890.279.936	22,91
8.	ROTI	2016	101.019.619.984	369.416.841.698	27,35
		2017	49.102.534.677	186.147.334.530	26,38
		2018	20.320.139.824	186.936.324.915	10,87
		2019	55.180.972.607	347.098.820.613	15,90
		2020	32.380.538.836	160.357.537.779	20,19

Lampiran Tabulasi Data Manajemen Pajak					
CETR = Pembayaran Pajak / Laba Sebelum Pajak					
No	Perusahaan	Tah-un	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR (%)
9.	SKBM	2016	12.702.356.112	30.809.950.308	41,23
		2017	13.706.785.039	31.761.022.154	43,16
		2018	10.858.232.331	20.887.453.647	51,98
		2019	1.849.753.949	5.163.201.735	35,83
		2020	11.582.613.128	13.568.762.041	85,36
10.	SKLT	2016	8.026.883.297	25.166.206.536	31,89
		2017	8.237.550.980	27.370.565.356	30,09
		2018	6.739.406.776	39.954.131.252	16,87
		2019	14.650.111.931	56.782.206.578	25,80
		2020	9.276.903.406	55.673.983.557	16,66
11.	STTP	2016	45.345.049.181	217.746.308.540	20,82
		2017	60.687.733.168	288.545.819.603	21,03
		2018	89.810.904.314	324.694.650.175	27,66
		2019	92.823.915.898	607.043.293.422	15,29
		2020	115.958.847.906	773.607.195.121	14,99
12.	ULTJ	2016	253.030.000.000	932.483.000.000	27,13
		2017	347.000.000.000	1.026.231.000.000	33,81
		2018	291.922.000.000	949.018.000.000	30,76
		2019	278.947.000.000	1.375.359.000.000	20,28
		2020	321.089.000.000	1.421.517.000.000	22,59
Sub Sektor Pabrik Tembakau					
13.	GGRM	2016	2.405.902.000.000	8.931.136.000.000	26,94
		2017	2.638.900.000.000	10.436.512.000.000	25,28
		2018	2.897.496.000.000	10.479.242.000.000	27,65
		2019	3.204.640.000.000	14.487.736.000.000	22,12
		2020	2.251.510.000.000	9.663.133.000.000	23,30
14.	HMSP	2016	3.826.053.000.000	17.011.447.000.000	22,49
		2017	4.337.944.000.000	16.894.806.000.000	25,68
		2018	4.412.498.000.000	17.961.269.000.000	24,57
		2019	4.630.741.000.000	18.259.423.000.000	25,36
		2020	2.948.120.000.000	11.161.466.000.000	26,41
15.	WIIM	2016	45.325.281.371	136.662.997.252	33,17
		2017	29.473.484.420	54.491.308.212	54,09
		2018	18.067.051.524	70.730.637.719	25,54
		2019	14.976.706.662	42.874.167.628	34,93
		2020	14.115.264.412	215.214.468.586	6,56
Sub Sektor Farmasi					
16.	DVLA	2016	40.763.252.000	214.417.056.000	19,01
		2017	53.649.116.000	226.147.921.000	23,72
		2018	76.348.303.000	272.843.904.000	27,98
		2019	79.897.505.000	301.250.035.000	26,52
		2020	57.943.498.000	214.069.167.000	27,07
		2016	752.684.488.364	3.091.188.460.230	24,35
		2017	782.316.500.559	3.241.186.725.992	24,14

Lampiran Tabulasi Data Manajemen Pajak					
CETR = Pembayaran Pajak / Laba Sebelum Pajak					
No	Perusahaan	Tah-un	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR (%)
17.	KLBF	2018	838.106.813.718	3.306.399.669.021	25,35
		2019	839.509.478.376	3.402.616.824.533	24,67
		2020	602.524.461.985	3.627.632.574.744	16,61
18.	MERK	2016	68.360.716.000	214.916.161.000	31,81
		2017	16.274.314.000	41.895.576.000	38,84
		2018	18.497.632.000	50.208.396.000	36,84
		2019	48.134.832.000	125.899.182.000	38,23
		2020	9.950.605.000	105.999.860.000	9,39
19.	PYFA	2016	2.274.563.489	7.053.407.169	32,25
		2017	2.094.731.164	9.599.280.773	21,82
		2018	2.961.618.997	11.317.263.776	26,17
		2019	3.136.873.781	12.518.822.477	25,06
		2020	4.303.412.969	29.642.208.781	14,52
20.	SCPI	2016	78.811.872.000	223.074.487.000	35,33
		2017	70.503.742.000	180.641.570.000	39,03
		2018	57.207.858.000	193.103.981.000	29,62
		2019	80.799.245.000	181.987.452.000	44,40
		2020	45.417.067.000	288.685.180.000	15,73
21.	SIDO	2016	135.684.000.000	629.082.000.000	21,57
		2017	147.330.000.000	681.889.000.000	21,61
		2018	189.738.000.000	867.837.000.000	21,86
		2019	222.621.000.000	1.073.835.000.000	20,73
		2020	244.347.000.000	1.199.548.000.000	20,37
22.	TSPC	2016	466.394.302.993	718.958.200.369	64,87
		2017	538.603.804.385	744.090.262.873	72,38
		2018	526.447.491.388	727.700.178.905	72,34
		2019	608.007.758.084	796.220.911.472	76,36
		2020	521.052.950.620	1.064.448.534.874	48,95
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga					
23.	UNVR	2016	2.066.894.000.000	8.571.885.000.000	24,11
		2017	2.406.049.000.000	9.371.661.000.000	25,67
		2018	2.340.586.000.000	12.148.087.000.000	19,27
		2019	3.120.471.000.000	9.901.772.000.000	31,51
		2020	1.693.036.000.000	9.206.869.000.000	18,39

(Sumber: www.idx.com dan www.idnfinancials.com data diolah oleh penulis, 2021)

Lampiran 2. Perhitungan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data Ukuran Perusahaan				
Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)				
No	Perusahaan	Tahun	Total Aset	Rasio Ukuran Perusahaan (%)
Sub Sektor Makanan dan Minuman				
1.	ADES	2016	767.479.000.000	27,3664
		2017	840.236.000.000	27,4569
		2018	881.274.000.000	27,5046
		2019	822.375.000.000	27,4355
		2020	958.791.000.000	27,5889
2.	CEKA	2016	1.425.964.152.418	27,9859
		2017	1.392.636.444.501	27,9622
		2018	1.168.956.042.706	27,7871
		2019	1.393.079.542.074	27,9625
		2020	1.566.673.828.068	28,0799
3.	DLTA	2016	1.197.796.650.000	27,8115
		2017	1.340.842.765.000	27,9243
		2018	1.523.517.170.000	28,0520
		2019	1.425.983.722.000	27,9859
		2020	1.225.580.913.000	27,8344
4.	ICBP	2016	28.901.948.000.000	30,9949
		2017	31.619.514.000.000	31,0848
		2018	34.367.153.000.000	31,1681
		2019	38.709.314.000.000	31,2871
		2020	103.588.325.000.000	32,2714
5.	INDF	2016	82.174.515.000.000	32,0399
		2017	87.939.488.000.000	32,1077
		2018	96.537.796.000.000	32,2010
		2019	96.198.559.000.000	32,1974
		2020	163.136.516.000.000	32,7256
6.	MLBI	2016	2.275.038.000.000	28,4530
		2017	2.510.078.000.000	28,5513
		2018	2.889.501.000.000	28,6921
		2019	2.896.950.000.000	28,6947
		2020	2.907.425.000.000	28,6983
7.	MYOR	2016	12.922.421.859.142	30,1899
		2017	14.915.849.800.251	30,3334
		2018	17.591.706.426.634	30,4984
		2019	19.037.918.806.473	30,5774
		2020	19.777.500.514.550	30,6156
		2016	2.919.640.858.718	28,7025
		2017	4.559.573.709.411	29,1482

Lampiran Tabulasi Data Ukuran Perusahaan				
Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)				
No	Perusahaan	Tahun	Total Aset	Rasio Ukuran Perusahaan (%)
8.	ROTI	2018	4.393.810.380.883	29,1112
		2019	4.682.083.844.951	29,1748
		2020	4.452.166.671.985	29,1244
9.	SKBM	2016	1.001.657.012.004	27,6327
		2017	1.623.027.475.045	28,1153
		2018	1.771.365.972.009	28,2028
		2019	1.820.383.352.811	28,2301
		2020	1.768.660.546.754	28,2012
10.	SKLT	2016	568.239.939.951	27,0658
		2017	636.284.210.210	27,1789
		2018	747.293.725.435	27,3397
		2019	790.845.543.826	27,3964
		2020	773.863.042.440	27,3747
11.	STTP	2016	2.337.207.195.055	28,4799
		2017	2.342.432.443.196	28,4822
		2018	2.631.189.810.030	28,5985
		2019	2.881.563.083.954	28,6893
		2020	3.448.995.059.882	28,8691
12.	ULTJ	2016	4.239.200.000.000	29,0754
		2017	5.186.940.000.000	29,2772
		2018	5.555.871.000.000	29,3459
		2019	6.608.422.000.000	29,5194
		2020	8.754.116.000.000	29,8005
Sub Sektor Pabrik Tembakau				
13.	GGRM	2016	62.951.634.000.000	31,7734
		2017	66.759.930.000.000	31,8321
		2018	69.097.219.000.000	31,8665
		2019	78.647.274.000.000	31,9960
		2020	78.191.409.000.000	31,9902
14.	HMSP	2016	42.508.277.000.000	31,3807
		2017	43.141.063.000.000	31,3955
		2018	46.602.420.000.000	31,4727
		2019	50.902.806.000.000	31,5609
		2020	49.674.030.000.000	31,5365
15.	WIIM	2016	1.353.634.132.275	27,9338
		2017	1.225.712.093.041	27,8345
		2018	1.255.573.914.558	27,8586
		2019	1.299.521.608.556	27,8930
		2020	1.614.442.007.528	28,1100
Sub Sektor Farmasi				
		2016	1.531.365.558.000	28,0572
		2017	1.640.886.147.000	28,1263

Lampiran Tabulasi Data Ukuran Perusahaan				
Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)				
No	Perusahaan	Tahun	Total Aset	Rasio Ukuran Perusahaan (%)
16.	DVLA	2018	1.682.821.739.000	28,1515
		2019	1.829.960.714.000	28,2353
		2020	1.986.711.872.000	28,3175
17.	KLBF	2016	15.226.009.210.657	30,3540
		2017	16.616.239.416.335	30,4414
		2018	18.146.206.145.369	30,5295
		2019	20.264.726.862.584	30,6399
		2020	22.564.300.317.374	30,7474
18.	MERK	2016	743.934.894.000	27,3352
		2017	847.006.544.000	27,4650
		2018	1.263.113.689.000	27,8646
		2019	901.060.986.000	27,5268
		2020	929.901.046.000	27,5583
19.	PYFA	2016	167.062.795.608	25,8416
		2017	159.563.931.041	25,7957
		2018	187.057.163.854	25,9547
		2019	190.786.208.250	25,9744
		2020	228.575.380.866	26,1551
20.	SCPI	2016	1.393.083.772.000	27,9625
		2017	1.354.104.356.000	27,9342
		2018	1.635.702.779.000	28,1231
		2019	1.417.704.185.000	27,9801
		2020	1.598.281.523.000	28,0999
21.	SIDO	2016	2.987.614.000.000	28,7255
		2017	3.158.198.000.000	28,7810
		2018	3.337.628.000.000	28,8363
		2019	3.536.898.000.000	28,8943
		2020	3.849.516.000.000	28,9790
22.	TSPC	2016	6.585.807.349.438	29,5159
		2017	7.434.900.309.021	29,6372
		2018	7.869.975.060.326	29,6941
		2019	8.372.769.580.743	29,7560
		2020	9.104.657.533.366	29,8398
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga				
23.	UNVR	2016	16.745.695.000.000	30,4492
		2017	18.906.413.000.000	30,5705
		2018	20.326.869.000.000	30,6430
		2019	20.649.371.000.000	30,6587
		2020	20.534.632.000.000	30,6531

(Sumber: www.idx.com dan www.idnfinancials.com data diolah oleh penulis, 2021)

Lampiran 3. Perhitungan Tingkat Utang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data Tingkat Utang					
Debt Equity Ratio (DER) = Total Utang / Total Ekuitas					
No	Perusahaan	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	DER (%)
Sub Sektor Makanan dan Minuman					
1.	ADES	2016	383.091.000.000	384.388.000.000	99,66
		2017	417.225.000.000	423.011.000.000	98,63
		2018	399.360.000.000	481.914.000.000	82,87
		2019	254.438.000.000	567.937.000.000	44,80
		2020	258.283.000.000	700.508.000.000	36,87
2.	CEKA	2016	538.044.038.690	887.920.113.728	60,59
		2017	489.592.257.434	903.044.187.067	54,21
		2018	192.308.466.864	976.647.575.842	19,69
		2019	261.784.845.240	1.131.294.696.834	23,14
		2020	305.958.833.204	1.260.714.994.864	24,27
3.	DLTA	2016	185.422.642.000	1.012.374.008.000	18,31
		2017	196.197.372.000	1.144.645.393.000	17,14
		2018	239.353.356.000	1.284.163.814.000	18,64
		2019	212.420.390.000	1.213.563.332.000	17,50
		2020	205.681.950.000	1.019.898.963.000	20,17
4.	ICBP	2016	10.401.125.000.000	18.500.823.000.000	56,22
		2017	11.295.184.000.000	20.324.330.000.000	55,57
		2018	11.660.003.000.000	22.707.150.000.000	51,35
		2019	12.038.210.000.000	26.671.104.000.000	45,13
		2020	53.270.272.000.000	50.318.053.000.000	105,87
5.	INDF	2016	38.233.092.000.000	43.941.423.000.000	87,01
		2017	41.182.764.000.000	46.756.724.000.000	88,08
		2018	46.620.996.000.000	49.916.800.000.000	93,40
		2019	41.996.071.000.000	54.202.488.000.000	77,48
		2020	83.998.472.000.000	79.138.044.000.000	106,14
6.	MLBI	2016	1.454.398.000.000	820.640.000.000	177,23
		2017	1.445.173.000.000	1.064.905.000.000	135,71
		2018	1.721.965.000.000	1.167.536.000.000	147,49
		2019	1.750.943.000.000	1.146.007.000.000	152,79
		2020	1.474.019.000.000	1.433.406.000.000	102,83
7.	MYOR	2016	6.657.165.872.077	6.265.255.987.065	106,25
		2017	7.561.503.434.179	7.354.346.366.072	102,82
		2018	9.049.161.944.940	8.542.544.481.694	105,93
		2019	9.137.978.611.155	9.899.940.195.318	92,30
		2020	8.506.032.464.592	11.271.468.049.958	75,46
		2016	1.476.889.086.692	1.442.751.772.026	102,37
		2017	1.739.467.993.982	2.820.105.715.429	61,68

Lampiran Tabulasi Data Tingkat Utang					
Debt Equity Ratio (DER) = Total Utang / Total Ekuitas					
No	Perusahaan	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	DER (%)
8.	ROTI	2018	1.476.909.260.772	2.916.901.120.111	50,63
		2019	1.589.486.465.854	3.092.597.379.097	51,40
		2020	1.224.495.624.254	3.227.671.047.731	37,94
9.	SKBM	2016	633.267.725.358	368.389.286.646	171,90
		2017	599.790.014.646	1.023.237.460.399	58,62
		2018	730.789.419.438	1.040.576.552.571	70,23
		2019	784.562.971.811	1.035.820.381.000	75,74
		2020	806.678.887.419	961.981.659.335	83,86
10.	SKLT	2016	272.088.644.079	296.151.295.872	91,87
		2017	328.714.435.982	307.569.774.228	106,87
		2018	408.057.718.435	339.236.007.000	120,29
		2019	410.463.595.860	380.381.947.966	107,91
		2020	366.908.471.713	406.954.570.727	90,16
11.	STTP	2016	1.168.695.057.385	1.168.512.137.670	100,01
		2017	957.660.374.836	1.384.772.068.360	69,16
		2018	984.801.863.078	1.646.397.946.952	59,81
		2019	733.556.075.974	2.148.007.007.980	34,15
		2020	775.696.860.736	2.673.298.199.144	29,02
12.	ULTJ	2016	749.967.000.000	3.489.233.000.000	21,49
		2017	978.185.000.000	4.208.755.000.000	23,24
		2018	780.915.000.000	4.774.956.000.000	16,35
		2019	953.283.000.000	5.655.139.000.000	16,86
		2020	3.972.379.000.000	4.781.737.000.000	83,07
Sub Sektor Pabrik Tembakau					
13.	GGRM	2016	23.387.406.000.000	39.564.228.000.000	59,11
		2017	24.572.266.000.000	42.187.664.000.000	58,24
		2018	23.963.934.000.000	45.133.285.000.000	53,09
		2019	27.716.516.000.000	50.930.758.000.000	54,42
		2020	19.668.941.000.000	58.522.468.000.000	33,61
14.	HMSP	2016	8.333.263.000.000	34.175.014.000.000	24,38
		2017	9.028.078.000.000	34.112.985.000.000	26,46
		2018	11.244.167.000.000	35.358.253.000.000	31,80
		2019	15.223.076.000.000	35.679.730.000.000	42,66
		2020	19.432.604.000.000	30.241.426.000.000	64,26
15.	WIIM	2016	362.540.740.471	991.093.391.804	36,58
		2017	247.620.731.930	978.091.361.111	25,32
		2018	250.337.111.893	1.005.236.802.665	24,90
		2019	266.351.031.079	1.033.170.577.477	25,78
		2020	428.590.166.019	1.185.851.841.509	36,14
Sub Sektor Farmasi					
		2016	451.785.946.000	1.079.579.612.000	41,85
		2017	524.586.078.000	1.116.300.069.000	46,99

Lampiran Tabulasi Data Tingkat Utang					
Debt Equity Ratio (DER) = Total Utang / Total Ekuitas					
No	Perusahaan	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	DER (%)
16.	DVLA	2018	482.559.876.000	1.200.261.863.000	40,20
		2019	523.881.726.000	1.306.078.988.000	40,11
		2020	660.424.729.000	1.326.287.143.000	49,79
17.	KLBF	2016	2.762.162.069.572	12.463.847.141.085	22,16
		2017	2.722.207.633.646	13.894.031.782.689	19,59
		2018	2.851.611.349.015	15.294.594.796.354	18,64
		2019	3.559.144.386.553	16.705.582.476.031	21,30
		2020	4.288.218.173.294	18.276.082.144.080	23,46
18.	MERK	2016	161.262.425.000	582.672.469.000	27,68
		2017	231.569.103.000	615.437.441.000	37,63
		2018	744.833.288.000	518.280.401.000	143,71
		2019	307.049.328.000	594.011.658.000	51,69
		2020	317.218.021.000	612.683.025.000	51,77
19.	PYFA	2016	61.554.005.181	105.508.790.427	58,34
		2017	50.707.930.330	108.856.000.711	46,58
		2018	68.129.603.054	118.927.560.800	57,29
		2019	66.060.214.687	124.725.993.563	52,96
		2020	70.943.630.711	157.631.750.155	45,01
20.	SCPI	2016	1.158.814.947.000	234.268.825.000	494,65
		2017	996.954.246.000	357.150.110.000	279,14
		2018	1.133.297.452.000	502.405.327.000	225,57
		2019	800.703.906.000	617.000.279.000	129,77
		2020	766.072.367.000	832.209.156.000	92,05
21.	SIDO	2016	229.729.000.000	2.757.885.000.000	8,33
		2017	262.333.000.000	2.895.865.000.000	9,06
		2018	435.014.000.000	2.902.614.000.000	14,99
		2019	472.191.000.000	3.064.707.000.000	15,40
		2020	627.776.000.000	3.221.740.000.000	19,48
22.	TSPC	2016	1.950.534.206.746	4.635.273.142.692	42,08
		2017	2.352.891.899.876	5.082.008.409.145	46,30
		2018	2.437.126.989.832	5.432.848.070.494	44,86
		2019	2.581.733.610.850	5.791.035.969.893	44,58
		2020	2.727.421.825.611	6.377.235.707.755	42,77
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga					
23.	UNVR	2016	12.041.437.000.000	4.704.258.000.000	255,97
		2017	13.733.025.000.000	5.173.388.000.000	265,45
		2018	12.943.202.000.000	7.383.667.000.000	175,29
		2019	15.367.509.000.000	5.281.862.000.000	290,95
		2020	15.597.264.000.000	4.937.368.000.000	315,90

(Sumber: www.idx.com dan www.idnfinancials.com data diolah oleh penulis, 2021)

Lampiran 4. Perhitungan Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri
Barang Konsumsi Periode 2016-2020

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data Profitabilitas					
ROA = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Lab a Bersih Setelah Pajak	Total Aset	ROA (%)
Sub Sektor Makanan dan Minuman					
1.	ADES	2016	55.951.000.000	767.479.000.000	7,30
		2017	38.242.000.000	840.236.000.000	4,55
		2018	52.958.000.000	881.274.000.000	6,01
		2019	83.885.000.000	822.375.000.000	10,20
		2020	135.789.000.000	958.791.000.000	14,16
2.	CEKA	2016	249.697.013.626	1.425.964.152.418	17,51
		2017	107.420.886.839	1.392.636.444.501	7,71
		2018	92.649.656.775	1.168.956.042.706	7,92
		2019	215.459.200.242	1.393.079.542.074	15,47
		2020	181.812.593.992	1.566.673.828.068	11,60
3.	DLTA	2016	254.509.268.000	1.197.796.650.000	21,25
		2017	279.772.635.000	1.340.842.765.000	20,86
		2018	338.129.985.000	1.523.517.170.000	22,19
		2019	317.815.177.000	1.425.983.722.000	22,29
		2020	123.465.762.000	1.225.580.913.000	10,07
4.	ICBP	2016	3.631.301.000.000	28.901.948.000.000	12,56
		2017	3.543.173.000.000	31.619.514.000.000	11,20
		2018	4.658.781.000.000	34.367.153.000.000	13,55
		2019	5.360.029.000.000	38.709.314.000.000	13,85
		2020	7.418.574.000.000	103.588.325.000.000	7,16
5.	INDF	2016	4.852.481.000.000	82.174.515.000.000	5,90
		2017	5.097.264.000.000	87.939.488.000.000	5,77
		2018	4.961.851.000.000	96.537.796.000.000	5,14
		2019	5.902.729.000.000	96.198.559.000.000	6,13
		2020	8.752.066.000.000	163.136.516.000.000	5,36
6.	MLBI	2016	982.129.000.000	2.275.038.000.000	43,17
		2017	1.322.067.000.000	2.510.078.000.000	52,67
		2018	1.224.807.000.000	2.889.501.000.000	42,39
		2019	1.206.059.000.000	2.896.950.000.000	41,63
		2020	285.617.000.000	2.907.425.000.000	9,82
7.	MYOR	2016	1.388.676.127.665	12.922.421.859.142	10,75
		2017	1.630.953.830.893	14.915.849.800.251	10,93
		2018	1.760.434.280.304	17.591.706.426.634	10,01
		2019	2.051.404.206.764	19.037.918.806.473	10,77
		2020	2.098.168.514.645	19.777.500.514.550	10,61
8.	ROTI	2016	279.777.368.831	2.919.640.858.718	9,58
		2017	135.364.021.139	4.559.573.709.411	2,97
		2018	127.171.436.363	4.393.810.380.883	2,89
		2019	236.518.557.420	4.682.083.844.951	5,05

Lampiran Tabulasi Data Profitabilitas					
ROA = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Aset	ROA (%)
		2020	168.610.282.478	4.452.166.671.985	3,79
9.	SKBM	2016	22.545.456.050	1.001.657.012.004	2,25
		2017	25.880.464.791	1.623.027.475.045	1,59
		2018	15.954.632.472	1.771.365.972.009	0,90
		2019	957.169.058	1.820.383.352.811	0,05
		2020	5.415.741.808	1.768.660.546.754	0,31
10.	SKLT	2016	20.646.121.074	568.239.939.951	3,63
		2017	22.970.715.348	636.284.210.210	3,61
		2018	31.954.131.252	747.293.725.435	4,27
		2019	44.943.627.900	790.845.543.826	5,68
		2020	42.520.246.722	773.863.042.440	5,49
11.	STTP	2016	174.176.717.866	2.337.207.195.055	7,45
		2017	216.024.079.834	2.342.432.443.196	9,22
		2018	255.088.886.019	2.631.189.810.030	9,69
		2019	482.590.522.840	2.881.563.083.954	16,75
		2020	628.628.879.549	3.448.995.059.882	18,23
12.	ULTJ	2016	709.826.000.000	4.239.200.000.000	16,74
		2017	718.402.000.000	5.186.940.000.000	13,88
		2018	701.607.000.000	5.555.871.000.000	12,63
		2019	1.035.865.000.000	6.608.422.000.000	15,67
		2020	1.109.666.000.000	8.754.116.000.000	12,67
Sub Sektor Pabrik Tembakau					
13.	GGRM	2016	6.672.682.000.000	62.951.634.000.000	10,60
		2017	7.755.347.000.000	66.759.930.000.000	11,62
		2018	7.793.068.000.000	69.097.219.000.000	11,28
		2019	10.880.704.000.000	78.647.274.000.000	13,83
		2020	7.647.729.000.000	78.191.409.000.000	9,78
14.	HMSP	2016	12.762.229.000.000	42.508.277.000.000	30,02
		2017	12.670.534.000.000	43.141.063.000.000	29,37
		2018	13.538.418.000.000	46.602.420.000.000	29,05
		2019	13.721.513.000.000	50.902.806.000.000	26,96
		2020	8.581.378.000.000	49.674.030.000.000	17,27
15.	WIIM	2016	106.290.306.868	1.353.634.132.275	7,85
		2017	40.589.790.851	1.225.712.093.041	3,31
		2018	51.142.850.919	1.255.573.914.558	4,07
		2019	27.328.091.481	1.299.521.608.556	2,10
		2020	172.506.562.986	1.614.442.007.528	10,68
Sub Sektor Farmasi					
16.	DVLA	2016	152.083.400.000	1.531.365.558.000	9,93
		2017	162.249.293.000	1.640.886.147.000	9,89
		2018	200.651.968.000	1.682.821.739.000	11,92
		2019	221.783.249.000	1.829.960.714.000	12,12
		2020	162.072.984.000	1.986.711.872.000	8,16
		2016	2.350.884.933.551	15.226.009.210.657	15,44

Lampiran Tabulasi Data Profitabilitas					
ROA = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Aset	ROA (%)
17.	KLBF	2017	2.453.251.410.604	16.616.239.416.335	14,76
		2018	2.497.261.964.757	18.146.206.145.369	13,76
		2019	2.537.601.823.645	20.264.726.862.584	12,52
		2020	2.799.622.515.814	22.564.300.317.374	12,41
18.	MERK	2016	153.842.847.000	743.934.894.000	20,68
		2017	144.677.294.000	847.006.544.000	17,08
		2018	1.163.324.165.000	1.263.113.689.000	92,10
		2019	78.256.797.000	901.060.986.000	8,68
		2020	71.902.263.000	929.901.046.000	7,73
19.	PYFA	2016	5.146.317.041	167.062.795.608	3,08
		2017	7.127.402.168	159.563.931.041	4,47
		2018	8.447.447.988	187.057.163.854	4,52
		2019	9.342.718.039	190.786.208.250	4,90
		2020	22.104.364.267	228.575.380.866	9,67
20.	SCPI	2016	134.727.271.000	1.393.083.772.000	9,67
		2017	122.515.010.000	1.354.104.356.000	9,05
		2018	127.091.642.000	1.635.702.779.000	7,77
		2019	112.652.526.000	1.417.704.185.000	7,95
		2020	218.362.874.000	1.598.281.523.000	13,66
21.	SIDO	2016	480.525.000.000	2.987.614.000.000	16,08
		2017	533.799.000.000	3.158.198.000.000	16,90
		2018	663.849.000.000	3.337.628.000.000	19,89
		2019	807.689.000.000	3.536.898.000.000	22,84
		2020	934.016.000.000	3.849.516.000.000	24,26
22.	TSPC	2016	545.493.536.262	6.585.807.349.438	8,28
		2017	557.339.581.996	7.434.900.309.021	7,50
		2018	540.378.145.887	7.869.975.060.326	6,87
		2019	595.154.912.874	8.372.769.580.743	7,11
		2020	834.369.751.682	9.104.657.533.366	9,16
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga					
23.	UNVR	2016	6.390.672.000.000	16.745.695.000.000	38,16
		2017	7.004.562.000.000	18.906.413.000.000	37,05
		2018	9.081.187.000.000	20.326.869.000.000	44,68
		2019	7.392.837.000.000	20.649.371.000.000	35,80
		2020	7.163.536.000.000	20.534.632.000.000	34,88

(Sumber: www.idx.com dan www.idnfinancials.com data diolah oleh penulis, 2021)

Lampiran 5. Perhitungan Intensitas Aset Tetap pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data Intensitas Aset Tetap					
Intensitas Aset Tetap = Total Aset Tetap / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Total Aset Tetap	Total Aset	Rasio IAT (%)
Sub Sektor Makanan dan Minuman					
1.	ADES	2016	374.177.000.000	767.479.000.000	48,75
		2017	478.184.000.000	840.236.000.000	56,91
		2018	447.249.000.000	881.274.000.000	50,75
		2019	405.448.000.000	822.375.000.000	49,30
		2020	351.626.000.000	958.791.000.000	36,67
2.	CEKA	2016	215.976.492.549	1.425.964.152.418	15,15
		2017	212.312.805.803	1.392.636.444.501	15,24
		2018	200.024.117.988	1.168.956.042.706	17,11
		2019	195.283.411.192	1.393.079.542.074	14,02
		2020	204.186.009.945	1.566.673.828.068	13,03
3.	DLTA	2016	96.275.498.000	1.197.796.650.000	8,04
		2017	89.978.944.000	1.340.842.765.000	6,72
		2018	90.191.394.000	1.523.517.170.000	5,92
		2019	85.234.517.000	1.425.983.722.000	5,98
		2020	79.117.279.000	1.225.580.913.000	6,45
4.	ICBP	2016	7.114.288.000.000	28.901.948.000.000	24,61
		2017	8.120.254.000.000	31.619.514.000.000	25,68
		2018	10.741.622.000.000	34.367.153.000.000	31,25
		2019	11.342.412.000.000	38.709.314.000.000	29,30
		2020	13.351.296.000.000	103.588.325.000.000	12,89
5.	INDF	2016	25.701.913.000.000	82.174.515.000.000	31,28
		2017	39.492.287.000.000	87.939.488.000.000	44,91
		2018	42.388.236.000.000	96.537.796.000.000	43,91
		2019	43.072.504.000.000	96.198.559.000.000	44,77
		2020	45.862.919.000.000	163.136.516.000.000	28,11
6.	MLBI	2016	1.278.015.000.000	2.275.038.000.000	56,18
		2017	1.364.086.000.000	2.510.078.000.000	54,34
		2018	1.524.061.000.000	2.889.501.000.000	52,74
		2019	1.559.289.000.000	2.896.950.000.000	53,82
		2020	1.479.447.000.000	2.907.425.000.000	50,88
7.	MYOR	2016	3.859.420.029.792	12.922.421.859.142	29,87
		2017	3.988.757.428.380	14.915.849.800.251	26,74
		2018	4.258.300.525.120	17.591.706.426.634	24,21
		2019	4.674.963.819.225	19.037.918.806.473	24,56
		2020	6.043.201.970.326	19.777.500.514.550	30,56
8.	ROTI	2016	1.842.722.492.525	2.919.640.858.718	63,11
		2017	1.993.663.314.016	4.559.573.709.411	43,72
		2018	2.222.133.112.899	4.393.810.380.883	50,57
		2019	2.540.413.874.692	4.682.083.844.951	54,26

Lampiran Tabulasi Data Intensitas Aset Tetap					
Intensitas Aset Tetap = Total Aset Tetap / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Total Aset Tetap	Total Aset	Rasio IAT (%)
		2020	2.434.486.072.405	4.452.166.671.985	54,68
9.	SKBM	2016	436.018.707.335	1.001.657.012.004	43,53
		2017	485.558.490.029	1.623.027.475.045	29,92
		2018	582.660.258.194	1.771.365.972.009	32,89
		2019	602.802.562.379	1.820.383.352.811	33,11
		2020	440.748.401.586	1.768.660.546.754	24,92
10.	SKLT	2016	299.674.475.232	568.239.939.951	52,74
		2017	311.810.228.981	636.284.210.210	49,00
		2018	323.244.348.971	747.293.725.435	43,25
		2019	360.346.292.384	790.845.543.826	45,56
		2020	354.930.905.744	773.863.042.440	45,86
11.	STTP	2016	1.107.152.196.056	2.337.207.195.055	47,37
		2017	1.125.768.977.479	2.342.432.443.196	48,06
		2018	1.096.143.561.950	2.631.189.810.030	41,66
		2019	1.124.520.287.704	2.881.563.083.954	39,02
		2020	1.538.988.540.784	3.448.995.059.882	44,62
12.	ULTJ	2016	1.042.072.000.000	4.239.200.000.000	24,58
		2017	1.336.398.000.000	5.186.940.000.000	25,76
		2018	1.453.135.000.000	5.555.871.000.000	26,15
		2019	1.556.666.000.000	6.608.422.000.000	23,56
		2020	1.715.401.000.000	8.754.116.000.000	19,59
Sub Sektor Pabrik Tembakau					
13.	GGRM	2016	20.498.950.000.000	62.951.634.000.000	32,56
		2017	21.408.575.000.000	66.759.930.000.000	32,07
		2018	22.758.558.000.000	69.097.219.000.000	32,94
		2019	25.373.983.000.000	78.647.274.000.000	32,36
		2020	27.605.038.000.000	78.191.409.000.000	35,30
14.	HMSP	2016	6.988.232.000.000	42.508.277.000.000	16,44
		2017	6.890.750.000.000	43.141.063.000.000	15,97
		2018	7.288.435.000.000	46.602.420.000.000	15,64
		2019	7.297.912.000.000	50.902.806.000.000	14,34
		2020	6.582.808.000.000	49.674.030.000.000	13,25
15.	WIIM	2016	330.448.090.705	1.353.634.132.275	24,41
		2017	312.881.022.672	1.225.712.093.041	25,53
		2018	319.990.859.164	1.255.573.914.558	25,49
		2019	329.061.638.626	1.299.521.608.556	25,32
		2020	298.904.982.008	1.614.442.007.528	18,51
Sub Sektor Farmasi					
16.	DVLA	2016	404.599.316.000	1.531.365.558.000	26,42
		2017	395.989.095.000	1.640.886.147.000	24,13
		2018	394.751.573.000	1.682.821.739.000	23,46
		2019	392.923.654.000	1.829.960.714.000	21,47
		2020	434.473.766.000	1.986.711.872.000	21,87

Lampiran Tabulasi Data Intensitas Aset Tetap					
Intensitas Aset Tetap = Total Aset Tetap / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Total Aset Tetap	Total Aset	Rasio IAT (%)
17.	KLBF	2016	4.555.756.101.580	15.226.009.210.657	29,92
		2017	5.342.659.713.054	16.616.239.416.335	32,15
		2018	6.252.801.150.475	18.146.206.145.369	34,46
		2019	7.666.314.692.908	20.264.726.862.584	37,83
		2020	8.157.762.093.280	22.564.300.317.374	36,15
18.	MERK	2016	129.991.953.000	743.934.894.000	17,47
		2017	177.729.098.000	847.006.544.000	20,98
		2018	186.743.248.000	1.263.113.689.000	14,78
		2019	190.284.730.000	901.060.986.000	21,12
		2020	217.560.166.000	929.901.046.000	23,40
19.	PYFA	2016	79.954.782.788	167.062.795.608	47,86
		2017	75.929.987.318	159.563.931.041	47,59
		2018	90.377.679.595	187.057.163.854	48,32
		2019	88.397.889.858	190.786.208.250	46,33
		2020	84.564.914.050	228.575.380.866	36,99
20.	SCPI	2016	234.100.977.000	1.393.083.772.000	16,80
		2017	244.202.833.000	1.354.104.356.000	18,03
		2018	279.003.217.000	1.635.702.779.000	17,06
		2019	287.489.661.000	1.417.704.185.000	20,28
		2020	290.781.987.000	1.598.281.523.000	18,19
21.	SIDO	2016	1.051.227.000.000	2.987.614.000.000	35,19
		2017	1.215.176.000.000	3.158.198.000.000	38,48
		2018	1.553.362.000.000	3.337.628.000.000	46,54
		2019	1.593.059.000.000	3.536.898.000.000	45,04
		2020	1.568.264.000.000	3.849.516.000.000	40,74
22.	TSPC	2016	1.806.744.212.273	6.585.807.349.438	27,43
		2017	1.984.179.208.981	7.434.900.309.021	26,69
		2018	2.271.379.683.420	7.869.975.060.326	28,86
		2019	2.370.214.050.251	8.372.769.580.743	28,31
		2020	2.418.932.619.330	9.104.657.533.366	26,57
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga					
23.	UNVR	2016	9.529.476.000.000	16.745.695.000.000	56,91
		2017	10.422.133.000.000	18.906.413.000.000	55,12
		2018	10.627.387.000.000	20.326.869.000.000	52,28
		2019	10.715.376.000.000	20.649.371.000.000	51,89
		2020	10.419.902.000.000	20.534.632.000.000	50,74

(Sumber: www.idx.com dan www.idnfinancials.com data diolah oleh penulis, 2021)

Lampiran 6. Perhitungan Intensitas Persediaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2020

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data IntensitasPersediaan					
Intensitas Persediaan = Total Persediaan / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Total Persediaan	Total Aset	Rasio INV (%)
Sub Sektor Makanan dan Minuman					
1.	ADES	2016	95.474.000.000	767.479.000.000	12,44
		2017	107.977.000.000	840.236.000.000	12,85
		2018	109.137.000.000	881.274.000.000	12,38
		2019	78.755.000.000	822.375.000.000	9,58
		2020	80.118.000.000	958.791.000.000	8,36
2.	CEKA	2016	556.574.980.730	1.425.964.152.418	39,03
		2017	415.268.436.704	1.392.636.444.501	29,82
		2018	332.754.905.703	1.168.956.042.706	28,47
		2019	262.081.626.426	1.393.079.542.074	18,81
		2020	326.172.666.133	1.566.673.828.068	20,82
3.	DLTA	2016	183.868.498.000	1.197.796.650.000	15,35
		2017	178.863.917.000	1.340.842.765.000	13,34
		2018	205.396.087.000	1.523.517.170.000	13,48
		2019	207.460.611.000	1.425.983.722.000	14,55
		2020	185.922.488.000	1.225.580.913.000	15,17
4.	ICBP	2016	3.109.916.000.000	28.901.948.000.000	10,76
		2017	3.261.635.000.000	31.619.514.000.000	10,31
		2018	4.001.277.000.000	34.367.153.000.000	11,64
		2019	3.840.690.000.000	38.709.314.000.000	9,92
		2020	4.586.940.000.000	103.588.325.000.000	4,43
5.	INDF	2016	8.469.821.000.000	82.174.515.000.000	10,31
		2017	9.690.981.000.000	87.939.488.000.000	11,02
		2018	11.644.156.000.000	96.537.796.000.000	12,06
		2019	9.658.705.000.000	96.198.559.000.000	10,04
		2020	11.150.432.000.000	163.136.516.000.000	6,83
6.	MLBI	2016	138.137.000.000	2.275.038.000.000	6,07
		2017	171.620.000.000	2.510.078.000.000	6,84
		2018	172.217.000.000	2.889.501.000.000	5,96
		2019	165.633.000.000	2.896.950.000.000	5,72
		2020	171.037.000.000	2.907.425.000.000	5,88
7.	MYOR	2016	2.123.676.041.546	12.922.421.859.142	16,43
		2017	1.825.267.160.976	14.915.849.800.251	12,24
		2018	3.351.796.321.991	17.591.706.426.634	19,05
		2019	2.790.633.951.514	19.037.918.806.473	14,66
		2020	2.805.111.592.211	19.777.500.514.550	14,18
		2016	50.746.886.585	2.919.640.858.718	1,74

Lampiran Tabulasi Data Intensitas Persediaan					
Intensitas Persediaan = Total Persediaan / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Total Persediaan	Total Aset	Rasio INV (%)
8.	ROTI	2017	50.264.253.248	4.559.573.709.411	1,10
		2018	65.127.735.601	4.393.810.380.883	1,48
		2019	83.599.374.391	4.682.083.844.951	1,79
		2020	103.693.623.334	4.452.166.671.985	2,33
9.	SKBM	2016	238.247.341.317	1.001.657.012.004	23,78
		2017	293.162.796.955	1.623.027.475.045	18,06
		2018	302.148.568.290	1.771.365.972.009	17,06
		2019	410.800.635.623	1.820.383.352.811	22,57
		2020	388.035.141.921	1.768.660.546.754	21,94
10.	SKLT	2016	90.312.510.404	568.239.939.951	15,89
		2017	120.795.774.143	636.284.210.210	18,98
		2018	154.839.960.751	747.293.725.435	20,72
		2019	161.904.003.569	790.845.543.826	20,47
		2020	146.698.971.577	773.863.042.440	18,96
11.	STTP	2016	279.955.459.843	2.337.207.195.055	11,98
		2017	299.078.174.645	2.342.432.443.196	12,77
		2018	313.291.338.820	2.631.189.810.030	11,91
		2019	316.826.909.348	2.881.563.083.954	10,99
		2020	291.378.253.517	3.448.995.059.882	8,45
12.	ULTJ	2016	760.534.000.000	4.239.200.000.000	17,94
		2017	682.624.000.000	5.186.940.000.000	13,16
		2018	708.773.000.000	5.555.871.000.000	12,76
		2019	987.927.000.000	6.608.422.000.000	14,95
		2020	924.639.000.000	8.754.116.000.000	10,56
Sub Sektor Pabrik Tembakau					
13.	GGRM	2016	37.545.222.000.000	62.951.634.000.000	59,64
		2017	37.920.289.000.000	66.759.930.000.000	56,80
		2018	38.560.045.000.000	69.097.219.000.000	55,80
		2019	42.847.314.000.000	78.647.274.000.000	54,48
		2020	39.894.523.000.000	78.191.409.000.000	51,02
14.	HMSP	2016	19.442.023.000.000	42.508.277.000.000	45,74
		2017	18.023.238.000.000	43.141.063.000.000	41,78
		2018	15.183.197.000.000	46.602.420.000.000	32,58
		2019	16.376.231.000.000	50.902.806.000.000	32,17
		2020	18.093.707.000.000	49.674.030.000.000	36,42
15.	WIIM	2016	778.304.640.349	1.353.634.132.275	57,50
		2017	668.157.271.315	1.225.712.093.041	54,51
		2018	652.607.840.376	1.255.573.914.558	51,98
		2019	552.888.701.245	1.299.521.608.556	42,55
		2020	668.514.572.920	1.614.442.007.528	41,41
Sub Sektor Farmasi					
		2016	209.777.851.000	1.531.365.558.000	13,70

Lampiran Tabulasi Data Intensitas Persediaan					
Intensitas Persediaan = Total Persediaan / Total Aset					
No	Perusahaan	Tahun	Total Persediaan	Total Aset	Rasio INV (%)
16.	DVLA	2017	203.861.591.000	1.640.886.147.000	12,42
		2018	280.691.038.000	1.682.821.739.000	16,68
		2019	333.781.178.000	1.829.960.714.000	18,24
		2020	374.427.887.000	1.986.711.872.000	18,85
17.	KLBF	2016	3.344.404.151.105	15.226.009.210.657	21,96
		2017	3.557.496.638.218	16.616.239.416.335	21,41
		2018	3.474.587.231.854	18.146.206.145.369	19,15
		2019	3.737.976.007.703	20.264.726.862.584	18,45
		2020	3.599.745.931.242	22.564.300.317.374	15,95
18.	MERK	2016	231.211.654.000	743.934.894.000	31,08
		2017	289.064.085.000	847.006.544.000	34,13
		2018	270.515.224.000	1.263.113.689.000	21,42
		2019	235.663.073.000	901.060.986.000	26,15
		2020	317.336.033.000	929.901.046.000	34,13
19.	PYFA	2016	40.310.149.056	167.062.795.608	24,13
		2017	36.890.982.384	159.563.931.041	23,12
		2018	41.590.179.964	187.057.163.854	22,23
		2019	44.269.891.205	190.786.208.250	23,20
		2020	51.036.022.889	228.575.380.866	22,33
20.	SCPI	2016	388.137.486.000	1.393.083.772.000	27,86
		2017	347.357.441.000	1.354.104.356.000	25,65
		2018	456.974.105.000	1.635.702.779.000	27,94
		2019	510.327.418.000	1.417.704.185.000	35,99
		2020	278.895.042.000	1.598.281.523.000	17,45
21.	SIDO	2016	317.082.000.000	2.987.614.000.000	10,61
		2017	267.915.000.000	3.158.198.000.000	8,48
		2018	311.193.000.000	3.337.628.000.000	9,32
		2019	299.244.000.000	3.536.898.000.000	8,46
		2020	309.478.000.000	3.849.516.000.000	8,04
22.	TSPC	2016	1.362.026.037.353	6.585.807.349.438	20,68
		2017	1.478.762.390.030	7.434.900.309.021	19,89
		2018	1.507.993.277.295	7.869.975.060.326	19,16
		2019	1.416.073.420.751	8.372.769.580.743	16,91
		2020	1.488.087.633.710	9.104.657.533.366	16,34
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga					
23.	UNVR	2016	2.318.130.000.000	16.745.695.000.000	13,84
		2017	2.393.540.000.000	18.906.413.000.000	12,66
		2018	2.658.073.000.000	20.326.869.000.000	13,08
		2019	2.429.234.000.000	20.649.371.000.000	11,76
		2020	2.463.104.000.000	20.534.632.000.000	11,99

(Sumber: www.idx.com dan www.idnfinancials.com data diolah oleh penulis, 2021)